



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KUTAI TIMUR

Rancangan Teknokratik  
**RPJMD 2025-2029**  
Kabupaten Kutai Timur

Tim Penyusun



PT. REFORMASI BIROKRASI  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan .....	6
1.2 Dasar Hukum.....	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan .....	12
1.5 Sistematika Rancangan Tekonokratik .....	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	14
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	15
2.1.1. Geografi .....	15
2.1.2. Demografi.....	42
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya .....	44
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi .....	44
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	55
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	62
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah .....	63
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	75
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah .....	80
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	85
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	87
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	90
3.1 Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya.....	90
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	92

## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Luas lahan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021-2023.....	18
Tabel 2. 2 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021-2023 .....	19
Tabel 2.3 Populasi Ternak, Produksi Daging, dan Produksi Telur Hasil Peternakan Tahun 2021-2023.....	22
Tabel 2.4 Jumlah <i>Minirach</i> di Kabupaten Kutai Timur .....	23
Tabel 2.5 Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kutai Timur (ton) Tahun 2023.....	24
Tabel 2.6 Jumlah Perusahaan Besar Sawit di Kabupaten Kutai Timur 2023.....	25
Tabel 2.7 Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Kutai Timur 2019-2023 .....	26
Tabel 2.8 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Kutai Timur 2019-2023 .....	29
Tabel 2.9 Capaian Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2023.....	33
Tabel 2.10 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Kutai Timur 2019-2023 .....	34
Tabel 2.11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2019-2023 .....	36
Tabel 2.12 Kondisi Demografi Kutai Timur .....	42
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 - 2023 .....	45
Tabel 2.14 Perkembangan Penduduk Miskin 2019-2023 .....	50
Tabel 2.15 Kemiskinan Kutai Timur 2021-2023 .....	51
Tabel 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023.....	53
Tabel 2.17 Indeks Ketahanan Kualitas Kalimantan Timur dan Nasional 2022 .....	56
Tabel 2.18 Indeks Perlindungan Anak 2022 .....	57
Tabel 2. 19 Indeks Pemberdayaan Gender Kutai Timur 2020-2022.....	59
Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kaltim 2018-2022 .....	61
Tabel 2.21 PDRB Kabupaten Kutai Timur 2019-2023 .....	63
Tabel 2. 22 Indeks Pendidikan Kutai Timur 2019-2023 .....	76
Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023 .....	78
Tabel 2.24 Indeks Demokrasi Kalimantan Timur .....	85
Tabel 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kutai Timur 2023 .....	86
Tabel 2.26 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kutai Timur 2022 .....	87
Tabel 2.27 Indeks SPBE di Kalimantan Timur .....	88

Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024 .....	92
Tabel 3. 2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 – 2024 .....	93
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2023 .....	95
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah,Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2023.....	97
Tabel 3.5 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023.....	99
Tabel 3. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-203 .....	101
Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023.....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penyusunan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang dirancang untuk menentukan kebijakan masa depan melalui serangkaian pilihan rasional. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna optimalisasi pemanfaatan dan alokasi sumber daya dalam jangka waktu tertentu di wilayah tersebut. Keberhasilan dan kualitas pembangunan daerah akan tercermin dari hasil yang dicapai.

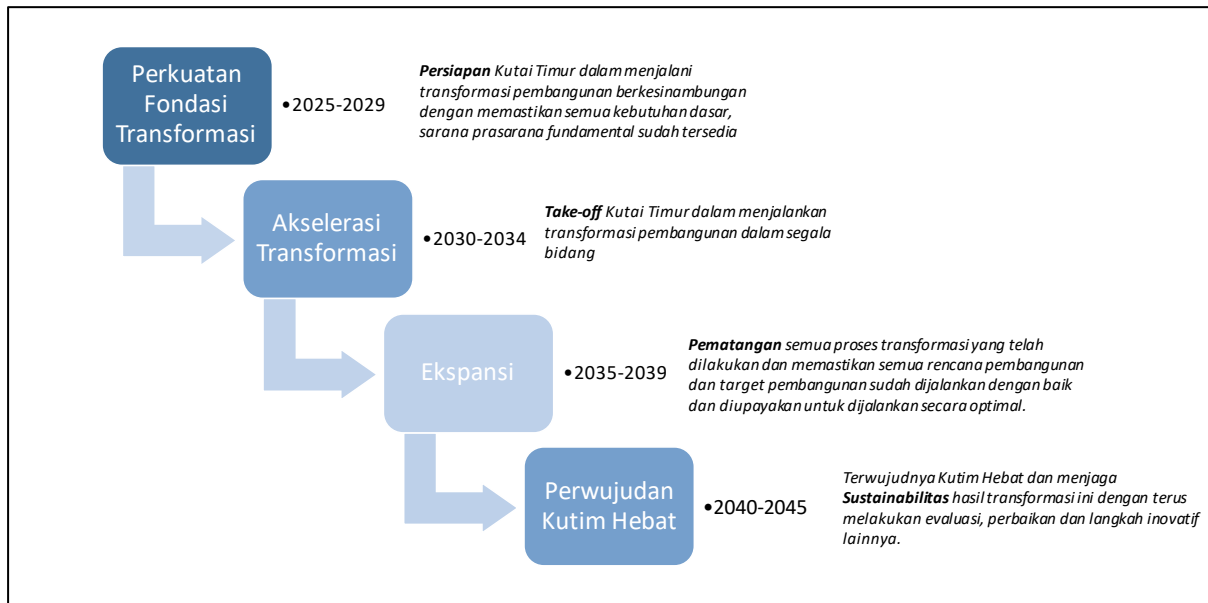
Pembangunan daerah adalah suatu proses terstruktur dan terencana yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, menciptakan peluang kerja dan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan mandat kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Secara substansial, perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah wajib menyusun rancangan teknokratik RPJMD. Dokumen ini merupakan rencana lima tahunan yang disusun sepenuhnya dengan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Periode ini merupakan periode lima tahun pertama dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045. Mengacu pada tahapan transformasi RPJPN, periode ini adalah momentum **penguatan pondasi transformasi**. Selain itu, fase ini dapat dilihat sebagai proses persiapan sebelum pelaksanaan transformasi. Dalam tahapan ini, harus dipastikan bahwa segala kebutuhan dasar, sarana prasarana fundamental, internalisasi rencana pembangunan, dan penyiapan ekosistem pendukung telah diselesaikan. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Timur dapat melakukan proses transformasi yang menyeluruh, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, rancangan ini memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun

2021-2026 serta masukan dari pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat. Dinamika geostrategis dan analisis tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 juga menjadi pertimbangan penting.

Gambar 1.1. Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur



Sumber: RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada. Dokumen ini juga menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD dan acuan bagi calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas mereka. Selanjutnya, dokumen RPJMD Teknokratik ini akan diintegrasikan dengan visi dan misi bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dan signifikan, yang memberikan landasan hukum dan panduan teknis bagi proses perencanaan ini. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi acuan, diurutkan dari level tertinggi dan tahun penyusunan terdahulu ke yang lebih muda:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
  22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  25. Surat Menteri Dalam Negeri No 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.....tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2045.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

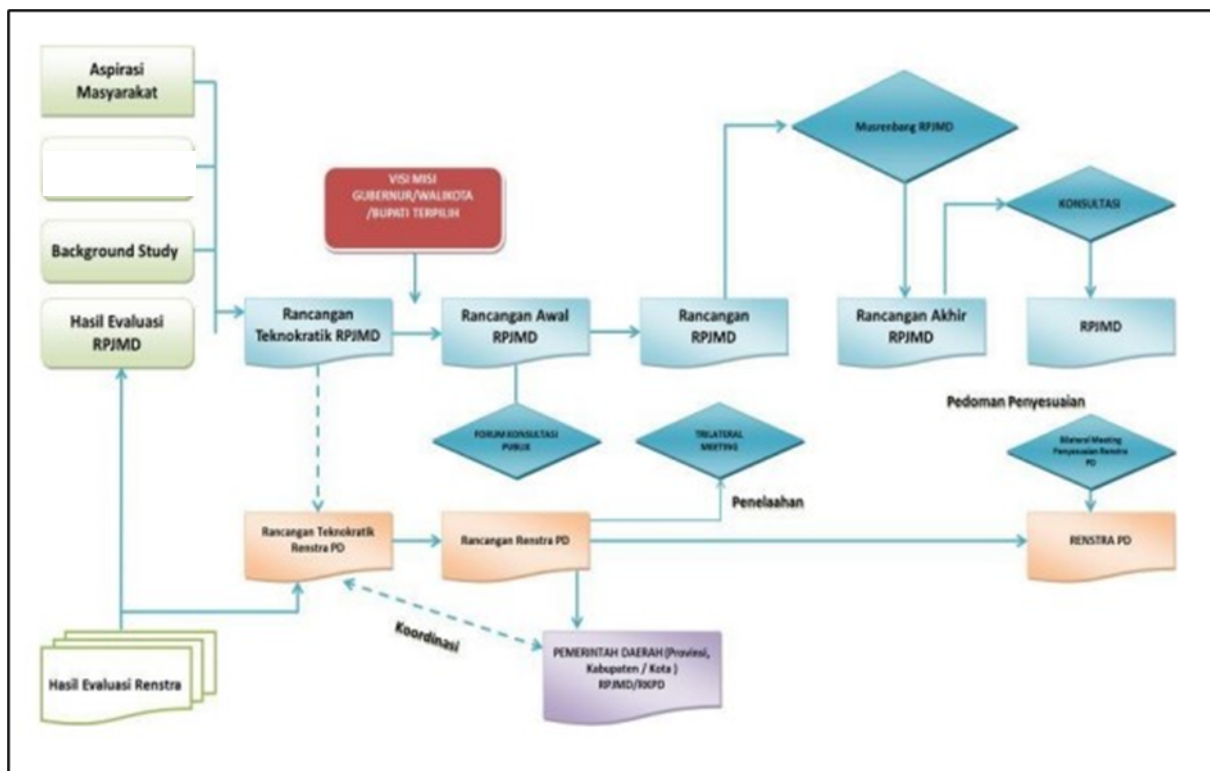
Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kutai Timur memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD 2025-2045 dan RTRW. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 adalah dokumen yang menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang akan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini memberikan kerangka strategis yang mencakup tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPJMD sebagai rencana pembangunan jangka menengah merupakan turunan dari RPJPD, sehingga harus selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan.

Selain itu, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan RPJMD. RTRW adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Timur, mencakup aspek tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dalam penyusunan RPJMD, pemanfaatan ruang harus direncanakan dengan memperhatikan

ketentuan yang ada dalam RTRW untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sinergi antara RPJMD dan RTRW memastikan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur yang diusulkan dalam RPJMD dapat diimplementasikan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dokumen lain yang berhubungan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RPJMN merupakan dokumen yang menyusun strategi dan program pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Kutai Timur harus selaras dengan RPJMN untuk memastikan bahwa program-program daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini penting agar terdapat kesinambungan antara pembangunan di tingkat nasional dan daerah, sehingga dapat tercipta sinergi yang optimal dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Hubungan antar dokumen-dokumen ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang integratif dan komprehensif untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Dengan memastikan bahwa RPJMD 2025-2029 selaras dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan jangka menengah, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan visi jangka panjang dan strategi nasional, menciptakan harmoni dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

RPJMD Tekonokratik Kabupaten Kutai Timur disusun dengan maksud untuk menjadi masukan penyusunan RPJMD sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur adalah:

- a. Teridentifikasinya gambaran umum kondisi daerah dan capaian hasil pembangunan 2019-2023.
- b. Teridentifikasinya gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.
- c. Teridentifikasinya permasalahan, isue strategis dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan..
- d. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi rangkaian kinerja, rangkaian kerja dan lokasi program prioritas unggulan.

#### **1.5 Sistematika Rancangan Tekonokratik**

Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 paling sedikit memuat:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penyusunan

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Antardokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

## BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Geografi

#### 2.1.2 Demografi

### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

### 2.3 Aspek Daya Saing

#### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.3.2 Daya Saing SDM

#### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

### 2.4 Aspek Pelayanan Umum

## BAB III Gambaran Keuangan Daerah

### 3.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

### 3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

## BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

### 4.1 Permasalahan

### 4.2 Isu Strategis Daerah

## BAB V Rekomendasi

### Rekomendasi Kebijakan

## BAB VI Penutup



## **BAB II**

# **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah disusun melalui pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan dari pendekatan empat aspek pembangunan: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Proses penyusunan ini disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi Kabupaten Kutai Timur saat ini. Analisis dilakukan menggunakan data lima tahun sebelumnya (tahun 2019-2023), untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan mencakup tren dan dinamika terbaru yang relevan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pendekatan teknokratik digunakan dalam mengolah data dan informasi, dengan tujuan untuk menghasilkan perencanaan yang berbasis bukti dan dapat diukur secara objektif. Pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang efektif. Permasalahan yang didapatkan dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi salah satu variabel yang diperhatikan dalam memberikan gambaran kondisi daerah.

Fokus utama dalam bab ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini Kabupaten Kutai Timur dan tantangan yang dihadapi. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai aspek pembangunan.

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1. Geografi**

###### **A. Peran Strategis Daerah**

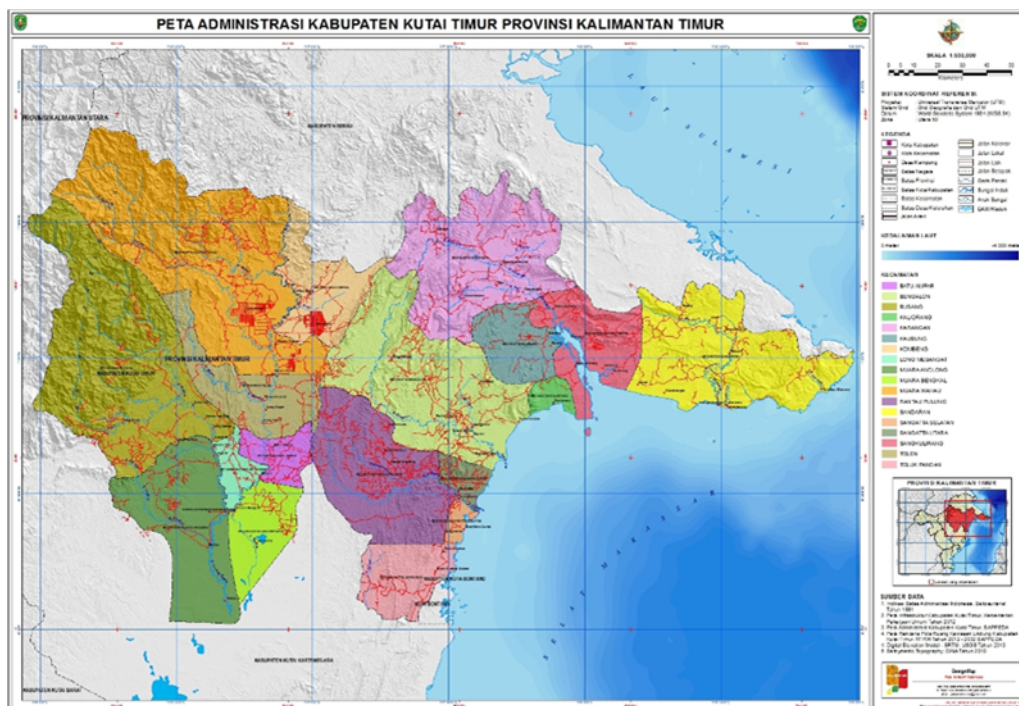
Kabupaten Kutai Timur, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah dengan karakteristik geografis dan lingkungan yang beragam. Secara astronomis, Kabupaten Kutai Timur berada di antara garis lintang  $10^{\circ}52'39''$  Utara hingga  $00^{\circ}02'10''$  Selatan dan garis bujur  $118^{\circ}58'19''$  Timur hingga  $115^{\circ}56'26''$  Timur, dengan total luas wilayah 31.239,50 kilometer persegi.

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur memberikan keunggulan strategis yang mendukung interaksi dengan wilayah lain. Beberapa poin strategis tersebut antara lain:

1. Terletak pada poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan jalur Kabupaten Nunukan – Malinau – Bulungan (Kota Tanjung Selor) – Berau (Kota Tanjung Redeb) – Kota Samarinda – Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Barat.
2. Terletak pada poros pertumbuhan ekonomi kawasan ekonomi terpadu SASAMBA (Samarinda – Samboja – Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan Bontang – Sangatta – Muara Wahau dan Sangkulirang.
3. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai lebih dari 200 km, yang terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi, serta bagian laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kabupaten Kutai Timur ini menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari proses pemekaran Kabupaten Kutai, yang diresmikan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Saat ini, wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur mencakup 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa. Sejarah pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 18 kecamatan menunjukkan dinamika perkembangan wilayah yang signifikan.

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2016

Dari perspektif geografis, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Selat Makassar, memberikan posisi strategis yang signifikan serta keanekaragaman geografis yang kaya. Posisi strategis ini mendukung interaksi regional dan pengembangan ekonomi yang lebih luas. Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas dengan wilayah-wilayah sekitar, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perdagangan dan mobilitas penduduk.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki iklim tropis khas Indonesia, dengan suhu udara rata-rata 26°C. Kutai Timur mengalami dua pola musim yang jelas, yaitu musim kemarau yang berlangsung dari Mei hingga Oktober, dan musim hujan yang mendominasi dari November hingga April. Kondisi iklim ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya, yang harus disesuaikan dengan karakteristik musim yang ada.

## **B. Potensi Sumber Daya Alam**

Topografi Kabupaten Kutai Timur sangat beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan yang tinggi. Sebagian besar wilayah memiliki kemiringan di atas 15%, dengan beberapa daerah mencapai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, terutama di wilayah barat laut yang berbatasan dengan Kabupaten Berau. Secara geologis, Kabupaten Kutai Timur terletak di zona pertemuan tiga lempeng utama, menjadikannya kaya akan deposit mineral seperti batubara, minyak, dan gas bumi. Formasi geologinya didominasi oleh Formasi Pemaluan dan alluvium, yang menggambarkan kompleksitas dan kekayaan sumber daya alam di wilayah ini.

Kabupaten Kutai Timur juga memiliki sumber daya air yang melimpah, dengan lebih dari 282 sungai dan beberapa danau penting. Sungai-sungai ini tidak hanya berperan penting dalam penyediaan air bersih, tetapi juga sebagai sarana transportasi utama, terutama ke daerah-daerah pedalaman yang sulit diakses melalui jalur darat. Dengan lanskap yang lengkap, termasuk dataran tinggi, bukit, gunung, danau, sungai, rawa, dan pantai, Kabupaten Kutai Timur menawarkan potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam. Potensi unggulan ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut:

### **1. Pertanian Tanaman Pangan**

Dalam upaya memahami dinamika sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur, analisis data historis mengenai luas tanam berbagai komoditas pertanian menjadi sangat penting. Data

yang mencakup periode lima tahun terakhir (2019-2023) ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tren dan perubahan dalam luas tanam komoditas utama seperti padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, sayuran, dan buah-buahan. Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengembangan sektor pertanian di masa mendatang.

Pentingnya data ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan faktual bagi penyusunan kebijakan dan program-program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan memahami fluktuasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi luas tanam dari tahun ke tahun, pemerintah daerah dapat merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Berikut adalah tabel yang menyajikan data luas tanam untuk berbagai komoditas pertanian di Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun terakhir:

Tabel 2. 1 Luas lahan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi sawah	Ha	4.713	3.841	5.105,30	5.006,00	4.385,15
2	Padi ladang	Ha	3.785	2.465	1.824,40	2267,00	2.384,93
3	Jagung	Ha	1.646	1.476	2.356,20	3190,00	461,56
4	Ubi kayu	Ha	364	378,4	262,30	746,00	233,15
5	Ubi jalar	Ha	108,8	134,4	93,80	247,00	110,53
6	Kacang tanah	Ha	93,2	112	66,90	200,00	86,07
7	Kedelai	Ha	8,0	13,7	9,10	30,00	6,00
8	Kacang hijau	Ha	3,0	8,1	8,70	2,40	1,10
9	Sayuran	Ha	1.282	1.768,3	938,27	1324,56	1036,61
10	Buah-buahan	Ha	2.024	4.882,23	7.274,34	22.238,72	15.232,31

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Timur (Data Diolah)

Analisis data luas tanam berbagai komoditas pertanian di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan pada beberapa komoditas utama. Padi sawah dan padi ladang, misalnya, mengalami penurunan luas tanam yang cukup drastis pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, namun menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2021 sebelum kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan luas tanam pada tahun-tahun tertentu dapat diakibatkan oleh berbagai faktor,

termasuk perubahan iklim, ketersediaan air, dan perubahan dalam praktik pertanian. Sementara itu, komoditas jagung mengalami peningkatan luas tanam yang signifikan pada tahun 2021 sebelum mengalami penurunan tajam pada tahun 2023.

Komoditas ubi kayu dan ubi jalar juga menunjukkan tren fluktuatif yang serupa. Luas tanam ubi kayu mengalami peningkatan pada tahun 2020 namun kembali menurun pada tahun 2021 dan 2023. Ubi jalar, meskipun menunjukkan peningkatan pada tahun 2020, mengalami penurunan pada tahun 2021 dan fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Sektor sayuran dan buah-buahan mencatat peningkatan yang signifikan dalam luas tanam pada tahun 2022, khususnya buah-buahan yang mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, luas tanam untuk sayuran dan buah-buahan kembali menurun, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan peningkatan luas tanam tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan yang dinamis. Fluktuasi dalam luas tanam mencerminkan variabilitas dalam kondisi eksternal serta respons petani terhadap faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat stabilitas dan pertumbuhan sektor pertanian. Intervensi pemerintah yang tepat, termasuk penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai, akses terhadap teknologi pertanian yang modern, dan kebijakan yang mendukung stabilitas harga komoditas, akan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2. 2 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi sawah	Ton	16.398	13.636	14.883,80	18.791,10	20.193,93
2	Padi ladang	Ton	13.272	8.750,4	6.586,40	5.319,43	4.795,67
3	Jagung	Ton	8.598	7.495	6.774,00	14.567,00	2.062,66
4	Ubi kayu	Ton	10.913	10.482	27,02	27,02	27,02
5	Ubi jalar	Ton	1.390	1.599	14,78	14,78	14,78
6	Kacang tanah	Ton	93,4	104,2	166,90	249,00	88,14
7	Kedelai	Ton	13	20	9,00	44,00	5,89
8	Kacang hijau	Ton	1,8	4,9	13,90	1,89	2,72
9	Sayuran	Ton	6.081	2.223,6	2.133,28	4.653,38	4.263,80
10	Buah-buahan	Ton	84.357	40.580,1	114.220,76	96.087,72	78.330,55

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Timur (Data diolah)

Analisis data produksi komoditas pertanian di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai komoditas utama. Produksi padi sawah mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 ke 2022. Sebaliknya, produksi padi ladang menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan selama periode yang sama, mencerminkan tantangan dalam mempertahankan produktivitas di lahan ladang. Produksi jagung mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 diikuti oleh penurunan drastis pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya variabilitas yang tinggi dalam kondisi pertanian dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi produksi.

Komoditas lainnya seperti ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan stabilitas dalam produksi, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Produksi sayuran dan buah-buahan, meskipun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, kembali menurun pada tahun 2023. Fluktuasi produksi pada komoditas kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau juga mencerminkan tantangan dalam mempertahankan tingkat produksi yang konsisten. Penurunan produksi pada beberapa komoditas ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya pertanian, peningkatan teknologi, dan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan stabilitas dan peningkatan produksi. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data akan sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

Untuk mengantisipasi degradasi lahan pertanian, memastikan lahan pertanian yang produktif tetap terjaga dan terlindungi dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai, meningkatkan ketahanan pangan daerah, mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan dan membuat regulasi yang mendukung pelestarian lahan pertanian agar bisa terus berfungsi dengan baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menyusun Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang diusulkan seluas 2.940,49 hektar.

## **2. Peternakan**

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, tahun 2024, produksi peternakan di Kutai Timur, selama periode 2021 hingga 2023, populasi ternak besar di Kabupaten Kutai Timur mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Populasi sapi mengalami sedikit penurunan dari 19.486 ekor pada tahun 2021 menjadi 19.305 ekor pada tahun 2023. Kerbau juga menunjukkan fluktuasi, dengan populasi turun dari 541 ekor pada

tahun 2021 menjadi 479 ekor pada tahun 2022, tetapi sedikit meningkat menjadi 491 ekor pada tahun 2023.

Populasi kambing mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8.096 ekor dari 8.625 ekor pada tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 8.460 ekor pada tahun 2023. Populasi babi mencatat penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 4.089 ekor dari 11.640 ekor pada tahun 2021, tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 4.839 ekor pada tahun 2023.

Produksi daging ternak besar menunjukkan variasi selama tiga tahun terakhir. Produksi daging sapi mengalami penurunan tajam dari 691,37 ton pada tahun 2021 menjadi 436,66 ton pada tahun 2022, tetapi sedikit meningkat menjadi 447,50 ton pada tahun 2023. Produksi daging kerbau meningkat signifikan dari 4,45 ton pada tahun 2021 menjadi 11,98 ton pada tahun 2022 dan mencapai 12,30 ton pada tahun 2023.

Produksi daging kambing relatif stabil, dengan sedikit penurunan dari 54,63 ton pada tahun 2021 menjadi 54,18 ton pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 55,50 ton pada tahun 2023. Produksi daging babi mengalami peningkatan yang konsisten dari 279,99 ton pada tahun 2021 menjadi 383,19 ton pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 392,80 ton pada tahun 2023.

Populasi unggas di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023. Populasi ayam kampung meningkat dari 453.662 ekor pada tahun 2021 menjadi 693.328 ekor pada tahun 2023. Populasi ayam ras pedaging juga mengalami peningkatan dari 3.826.782 ekor pada tahun 2021 menjadi 4.187.827 ekor pada tahun 2023. Ayam ras petelur mengalami kenaikan dari 63.000 ekor pada tahun 2021 menjadi 105.931 ekor pada tahun 2023.

Sementara itu, populasi itik mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 37.444 ekor dari 82.883 ekor pada tahun 2021, tetapi sedikit meningkat menjadi 38.381 ekor pada tahun 2023.

Produksi daging unggas menunjukkan peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Produksi daging ayam kampung meningkat dari 241,8 ton pada tahun 2021 menjadi 349,80 ton pada tahun 2023. Produksi daging ayam ras pedaging juga mengalami peningkatan dari 2.617,75 ton pada tahun 2021 menjadi 3.132,60 ton pada tahun 2023. Produksi daging ayam ras petelur meningkat dari 12,84 ton pada tahun 2021 menjadi 16,60 ton pada tahun 2023. Produksi daging itik juga meningkat dari 8,47 ton pada tahun 2021 menjadi 10,10 ton pada tahun 2023.

Produksi telur unggas di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Produksi telur ayam kampung meningkat dari 312,12

ton pada tahun 2021 menjadi 493,00 ton pada tahun 2023. Produksi telur ayam ras petelur juga meningkat dari 498,33 ton pada tahun 2021 menjadi 810,00 ton pada tahun 2023. Produksi telur itik meningkat dari 161,96 ton pada tahun 2021 menjadi 223,00 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.3 Populasi Ternak, Produksi Daging, dan Produksi Telur Hasil Peternakan Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
<b>A. Populasi Ternak Besar (ekor):</b>					
1.	Sapi	Ekor	19,486	19.336	19.305
2.	Kerbau	Ekor	541	479	491
3.	Kambing	Ekor	8,625	8.096	8.460
4.	Babi	Ekor	11,64	4.089	4.839
<b>B. Produksi Daging Ternak Besar (Ton):</b>					
1.	Sapi	Ton	691,37	436,66	447,50
2.	Kerbau	Ton	4,45	11,98	12,30
3.	Kambing	Ton	54,63	54,18	55,50
4.	Babi	Ton	279,99	383,19	392,80
<b>C. Populasi Unggas (ekor):</b>					
1.	Ayam Kampung	Ekor	453.662	685.920	693.328
2.	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.826.782	4.181.452	4.187.827
3.	Ayam Ras Petelur	Ekor	63.000	99.561	105.931
4.	Itik	Ekor	82.883	37.444	38.381
<b>D. Produksi Daging Unggas (Ton) :</b>					
1.	Ayam Kampung	Ton	241,8	341,26	349,80
2.	Ayam Ras Pedaging	Ton	2,617,75	3.056,19	3.132,60
3.	Ayam Ras Petelur	Ton	12,84	16,19	16,60
4.	Itik	Ton	8,47	9,19	10,10
<b>E. Produksi Telur Unggas (Ton) :</b>					
1.	Ayam Kampung	Ton	312,12	471,50	493,00
2.	Ayam Ras Petelur	Ton	498,33	787,20	810,00
3.	Itik	Ton	161,96	202,90	223,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

Tabel 2.4 Jumlah *Miniranch* di Kabupaten Kutai Timur

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kutai Timur	2	-	4	5	5

Sumber: Siranch, DPKH Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kalimantan Timur telah menerapkan strategi pengembangan peternakan sapi yang inovatif dan berbasis keberlanjutan. Salah satu inisiatif utama adalah memanfaatkan lahan bekas tambang melalui fasilitasi *miniranch*, serta mengintegrasikan peternakan sapi dengan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA). Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi daging sapi lokal guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang ada secara efisien dan ramah lingkungan.

### 3. Perkebunan

Dalam upaya mengoptimalkan potensi sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan pendekatan yang berbasis data dan analisis ilmiah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Kabupaten Kutai Timur memiliki beragam komoditas perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan utama. Pendekatan teknokratik yang digunakan dalam pengembangan sektor perkebunan ini menekankan pada penggunaan teknologi modern, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan praktik berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, data luas perkebunan berbagai komoditas di Kabupaten Kutai Timur menjadi dasar penting dalam perencanaan strategis. Data ini mencakup luas perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan kakao, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Analisis terhadap data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi, peluang, serta hambatan yang ada dalam setiap subsektor perkebunan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penyajian data luas perkebunan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi komoditas perkebunan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan memahami kondisi terkini dan potensi masing-masing komoditas, diharapkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dapat berkolaborasi dalam upaya pengembangan sektor perkebunan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Berikut ini adalah data luas perkebunan untuk berbagai komoditas di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.5 Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kutai Timur (ton) Tahun 2023

No	Kabupaten	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
1	Kutai Timur	7.876.111	679	1.557	59	1.456

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan data terbaru mengenai luas perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, terlihat bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dengan luas mencapai 7.876.111 hektar. Hal ini menunjukkan dominasi kelapa sawit dalam struktur ekonomi pertanian daerah tersebut, serta menegaskan peran strategisnya sebagai pendorong utama perekonomian lokal. Luasnya areal perkebunan kelapa sawit ini mencerminkan potensi besar dalam hal produksi minyak sawit yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dominasi kelapa sawit juga menuntut perhatian terhadap praktik-praktik perkebunan yang berkelanjutan guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain kelapa sawit, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki luas perkebunan kelapa sebesar 679 hektar, karet seluas 1.557 hektar, kopi seluas 59 hektar, dan kakao seluas 1.456 hektar. Diversifikasi komoditas perkebunan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan berbagai sektor agroindustri yang memiliki potensi nilai tambah. Perkebunan karet dan kakao, meskipun luasnya jauh lebih kecil dibandingkan kelapa sawit, tetap memainkan peran penting dalam menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi petani lokal serta berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah. Pengembangan komoditas kopi, meskipun masih relatif kecil, juga menunjukkan potensi untuk dioptimalkan lebih lanjut mengingat permintaan global terhadap kopi yang terus meningkat.

Perlu strategi pengelolaan dan pengembangan yang berbeda untuk setiap komoditas. Kelapa sawit, dengan luas perkebunan yang sangat besar, memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keberlanjutan dan efisiensi produksi. Sementara itu, komoditas seperti karet,

kakao, dan kopi membutuhkan dukungan dalam hal peningkatan produktivitas, kualitas, serta akses ke pasar. Pendekatan yang holistik dan integratif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sektor perkebunan dapat berkembang secara optimal, berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.6 Jumlah Perusahaan Besar Sawit di Kabupaten Kutai Timur 2023

Kabupaten	Jumlah Perusahaan Besar Sawit	Kapabilitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
Kutai Timur	38	2.040	1.828,56

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024

Dalam rangka meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan upaya hilirisasi produk perkebunan secara intensif dan terstruktur. Hilirisasi ini bertujuan untuk mengolah hasil produk perkebunan menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan adanya hilirisasi, produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di pasar akan cenderung stabil. Kabupaten Kutai Timur sendiri memiliki 38 Perusahaan Besar Sawit (PBS) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dengan kapasitas terpasang sebesar 2.040 ton/jam dan kapasitas terpakai sebesar 1.828,56 ton/jam.

Keberadaan PBS ini menjadi potensi besar bagi pengembangan industri hilir di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah daerah perlu mendorong masuknya investasi untuk pembangunan industri pengolahan yang menghasilkan turunan produk rumah tangga dari CPO, seperti minyak goreng, margarin, dan produk olahan lainnya. Selain itu, pembentukan korporasi pekebun juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas para petani. Penyediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses dari kebun menuju pabrik pengolahan, sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi dan peningkatan geliat perekonomian di Kutai Timur.

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 109 Perusahaan Besar Sawit, dengan total kapasitas terpasang sebesar 5.955 ton/jam dan kapasitas terpakai sebesar 5.319 ton/jam, Kabupaten Kutai Timur memainkan peran kunci dalam industri kelapa sawit regional. Upaya pemerintah untuk menarik investor dan membangun infrastruktur yang mendukung akan sangat menentukan keberhasilan hilirisasi dan peningkatan daya saing komoditi perkebunan di masa mendatang. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Timur dapat

memaksimalkan potensinya dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

#### 4. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perkembangan yang signifikan selama tahun 2019 hingga 2023, dengan berbagai aspek yang menunjukkan tren pertumbuhan yang beragam dari jumlah rumah tangga perikanan, produksi hasil perikanan, hingga nilai produksi yang dicapai.

Tabel 2.7 Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rumah Tangga Perikanan (RT):</b>						
1	Perikanan Laut	3.690	1.832	1.926	1.977	2.308
2	Perikanan Perairan Umum	1.820	1.092	995	1.003	1.655
3	Tambak	21	65	65	65	65
4	Kolam	673	100	110	110	166
5	Keramba	14	199	-	-	-
6	Budidaya Pantai/ Sawah	42	30	-	-	-
7	Rumput Laut	135	24	22	22	22
8	Jaring Apung Tawar	1	2	2	2	2
9	Jaring Tancap	4	4	-	-	-
10	Minapadi			2	2	2
11	Jaring Apung Laut			2	2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>6.400</b>	<b>3.318</b>	<b>3.124</b>	<b>3.183</b>	<b>4.221</b>
<b>Produksi Hasil Perikanan (Ton):</b>						
1	Perikanan Laut	5.086	4.976,94	4.977,00	4.978,00	6.315,05
2	Perikanan Perairan Umum	1.2	1.178,73	1.179,00	1.179,02	2.170,99
3	Tambak	920	30,62	36,35	36,34	37,69
4	Kolam	1.284	495,00	728,40	729,77	754,80
5	Keramba	84	127,00	-	-	-
6	Budidaya Pantai / Sawah	1.389	869,72	-	-	-
7	Rumput Laut	774,9	372,60	110,92	110,96	4,04
8	Jaring Apung Tawar	35	15,00			150,31
9	Jaring Tancap	70	20,00			33,46
10	Minapadi			3,00	1,50	-
11	Jaring Apung laut			4,97	-	0,44
	<b>Jumlah</b>	<b>10.842,90</b>	<b>8.085,61</b>	<b>7.072,42</b>	<b>7.068,38</b>	<b>9.466,78</b>
<b>Nilai Produksi Hasil Perikanan (Ribu Rp):</b>						

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Perikanan Laut	152.580.000	151.082.278	161.558.253	182.975.575	228.741.636
2	Perikanan Perairan Umum	36.000.000	24.420.881	28.661.060	32.641.340	55.932.240
3	Tambak	27.600.000	765.5	1.024.335	1.305.455	1.469.262
4	Kolam	38.520.000	12.383.000	26.906.975	29.260.295	27.091.604
5	Keramba	2.520.000	4.050.000	-	-	-
6	Budidaya Pantai / Sawah	41.670.000	21.743.000	-	-	-
7	Rumput Laut	23.247.000	2.049.300	332.565	446.544	149.650
8	Jaring Apung Tawar	1.050.000	450	1.332.565	1.411.250	1.052.135
9	Jaring Tancap	2.100.000	600			1.320.841
10	Minapadi			112.5	56.25	-
11	Jaring Apung Laut			1.151.716	-	145.950
<b>Jumlah</b>		<b>325.287.000</b>	<b>217.543.959</b>	<b>221.080.188</b>	<b>248.096.709</b>	<b>315.903.318</b>

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Timur (Data diolah)

Analisis terhadap data rumah tangga perikanan, produksi hasil perikanan, dan nilai produksi hasil perikanan di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan beberapa tren dan perubahan signifikan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan. Pada segmen rumah tangga perikanan, terjadi fluktuasi jumlah rumah tangga perikanan laut yang mengalami penurunan tajam dari 3.690 pada tahun 2019 menjadi 1.832 pada tahun 2020, namun kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 2.308 pada tahun 2023. Sementara itu, rumah tangga perikanan perairan umum juga menunjukkan tren serupa, dengan penurunan pada tahun 2020 dan peningkatan kembali pada tahun 2023. Komoditas lain seperti tambak, kolam, dan rumput laut menunjukkan stabilitas dalam jumlah rumah tangga, meskipun terdapat beberapa komoditas seperti keramba dan budidaya pantai/sawah yang menunjukkan penurunan drastis atau bahkan nol pada tahun-tahun tertentu.

Produksi hasil perikanan menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa komoditas, khususnya perikanan laut dan perairan umum, yang masing-masing mencapai 6.315,05 ton dan 2.170,99 ton pada tahun 2023. Namun, beberapa komoditas seperti keramba dan budidaya pantai/sawah mengalami stagnasi atau penurunan produksi. Nilai produksi hasil perikanan juga mencerminkan peningkatan yang signifikan, terutama pada perikanan laut yang nilai produksinya meningkat dari Rp152.580.000 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp228.741.636 ribu pada tahun 2023. Peningkatan nilai produksi ini menunjukkan adanya efisiensi dan peningkatan harga jual komoditas di pasar. Secara keseluruhan, jumlah nilai produksi hasil

perikanan meningkat dari Rp325.287.000 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp315.903.318 ribu pada tahun 2023, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Data ini mengindikasikan bahwa ada potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas petani ikan di Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor perikanan.

## **5. Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan efek berganda pada sektor-sektor lain seperti pertanian (termasuk bunga, buah, dan perikanan), industri kerajinan, perdagangan (seperti rumah makan), serta jasa (misalnya penginapan, pemandu wisata, dan transportasi). Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat memacu perekonomian dan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah sekitar destinasi wisata.

Kabupaten Kutai Timur memiliki berbagai obyek wisata yang menarik bagi pengunjung. Salah satu tempat yang terkenal adalah Taman Nasional Kutai, yang memiliki luas sekitar 192.709,55 hektar. Taman Nasional ini terkenal dengan kekayaan ekosistemnya yang mencakup hutan Dipterocarpaceae, hutan Ulin-Meranti-Kapur, vegetasi hutan mangrove, dan berbagai flora dan fauna khas seperti Orangutan, Bekantan, Owa Kalimantan, dan lainnya.

Selain itu, Kutai Timur juga memiliki lokasi wisata utama yang harus dikunjungi, di antaranya adalah Pantai Teluk Lombok, Teluk Perancis, Pantai Kenyamukan, dan Aquatig yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, serta Taman Nasional Kutai Mentoko, Pantai Birah-birahan di Kecamatan Sandaran, dan wisata tambang serta wisata religi di Bukit Pelangi. Hutan Lindung Wehea, yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Kawasan ini juga mencakup Gugusan Karst Sangkulirang dan Mangkalahat, yang menawarkan pemandangan gua-gua dan lukisan purba yang menarik bagi para penjelajah dan peneliti sejarah. Kabupaten Kutai Timur dengan potensi wisata alamnya yang kaya dan beragam, menawarkan peluang besar untuk pengembangan pariwisata yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Upaya pelestarian budaya penting untuk dilakukan mengingat semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kutai Timur terus diupayakan agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai budaya. Upaya peningkatan

jati diri masyarakat Kutai Timur dalam Penyelenggaraan Festival seni dan budaya, dan Penyelenggaraan Festival keagamaan.

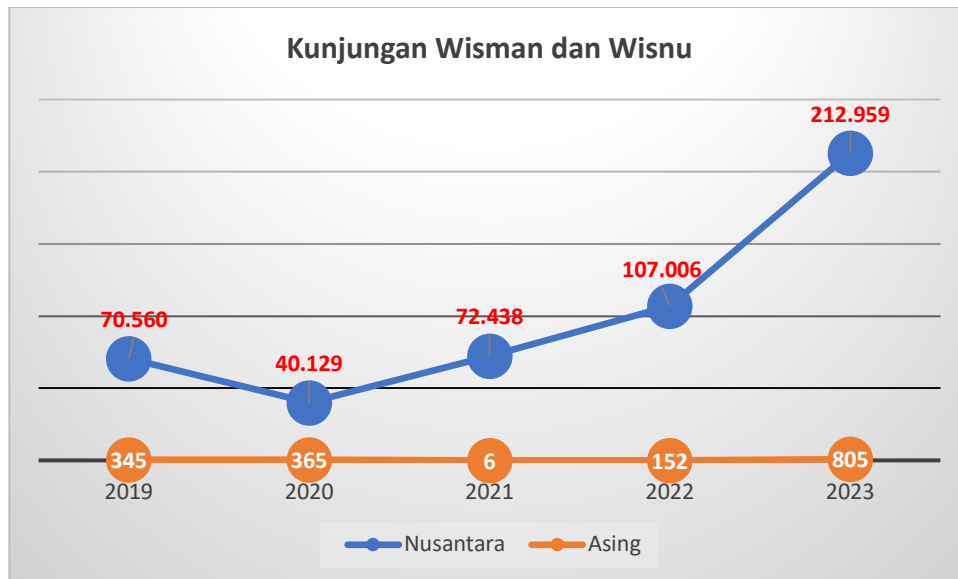
Untuk memahami dinamika dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Timur, analisis terhadap data kunjungan wisatawan selama periode 2019-2023 sangat penting. Data ini mencakup jumlah wisatawan nusantara dan asing yang berkunjung ke daerah tersebut setiap tahunnya. Dengan memahami tren kunjungan wisatawan, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan destinasi wisata, meningkatkan fasilitas dan layanan, serta menarik lebih banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini adalah data kunjungan wisatawan nusantara dan asing di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2.8 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Kutai Timur 2019-2023

Tipe Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023
Nusantara	70.560	40.129	72.438	107.006	212.959
Asing	345	365	6	152	805

Sumber: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur 2024

Analisis data kunjungan wisatawan di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah wisatawan nusantara dan asing. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan nusantara mencapai 70.560, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi 40.129, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Meskipun demikian, jumlah wisatawan nusantara kembali meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 212.959 kunjungan. Tren ini menunjukkan pemulihan yang kuat dan peningkatan minat wisatawan domestik terhadap destinasi di Kabupaten Kutai Timur.



Sementara itu, jumlah wisatawan asing menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam dan jumlah yang relatif kecil dibandingkan wisatawan nusantara. Pada tahun 2019, terdapat 345 wisatawan asing yang berkunjung, angka ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 365, namun anjlok drastis pada tahun 2021 hanya menjadi 6 wisatawan. Angka kunjungan wisatawan asing mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2022 dengan 152 wisatawan dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi 805 wisatawan. Meskipun pemulihannya lebih lambat dibandingkan wisatawan domestik, peningkatan jumlah wisatawan asing ini menandakan adanya potensi pasar internasional yang bisa lebih dioptimalkan dengan strategi pemasaran yang tepat dan peningkatan kerjasama dengan agen travel internasional. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dan inovatif untuk menarik lebih banyak wisatawan.

### C. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Namun, keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam di Kutai Timur tidak lepas dari ancaman bencana. Kutai Timur menghadapi tantangan dalam mengelola risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan. Banjir menjadi masalah tahunan di beberapa kecamatan, terutama selama musim hujan. Kondisi tanah yang mudah bergerak dan kelerengan yang tajam di beberapa wilayah meningkatkan risiko tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman serius, membutuhkan upaya koordinasi dan pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Timur, pemanfaatan ruang telah dilakukan dengan melalui pertimbangan yang matang dan terencana. Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. RTRW Kabupaten Kutai Timur dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya alam dan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Zonasi yang ditetapkan dalam RTRW memungkinkan pengembangan infrastruktur dan industri yang terencana dengan baik, mendukung pertanian dan pariwisata berkelanjutan, serta mengakomodir area konservasi untuk melindungi ekosistem vital.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, membagi Rencana Struktur Wilayah menjadi beberapa bagian, yaitu: Sistem Pusat Permukiman, Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Sistem Jaringan Prasaranan Lainnya. Khusus untuk Sistem Pusat Permukiman, dibagi menjadi PKN, PKW, PKSN dan PKL. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, terdapat dua pusat kegiatan, yaitu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, dengan Sangatta sebagai wilayah PKW di Kutai Timur. Selain PKW, Kutai Timur juga masuk kawasan PKL, yaitu a) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau dan pusat pertanian, perikanan, dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; b) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau c) kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi ekonomi kelautan lokal. Untuk wilayah Kutai Timur yang berfungsi menjadi kawasan PKL adalah wilayah Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pemanfaatan lahan di Kabupaten Kutai Timur, yang dimuat dalam dokumen Penyusunan Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur 2024, terdapat ketidaksesuaian penggunaan lahan antara rencana pola ruang dalam RTRW Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 dengan kondisi aktual di lapangan. Rencana pola ruang yang telah disusun dengan tujuan menjaga keseimbangan ekologis dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dalam banyak kasus tidak diikuti oleh pemanfaatan lahan yang sesuai. Contoh konkret dari ketidaksesuaian ini adalah lahan yang direncanakan sebagai kawasan perlindungan tetapi diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak hanya

mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap 446 bidang lokasi menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, di mana luas total lahan yang tidak sesuai dengan rencana mencapai 39.788,96 hektar. Sebagai contoh, lahan di Kecamatan Karangas dan Karangas Hilir yang direncanakan sebagai kawasan perlindungan telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar. Ketidaksesuaian ini mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan rencana tata ruang dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, tujuan utama dari RTRW untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dapat tercapai.

## **2. Persentase Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan di Kabupaten Kutai Timur telah membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Laporan KLHS RPJMD Kutai Timur 2025-2029 menyoroti bahwa terjadi laju *deforestasi* hutan yang tinggi untuk perkebunan serta konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Selain itu, terjadi perluasan lahan terbangun dengan rasio yang tinggi terhadap laju pertumbuhan penduduk. Fenomena ini menunjukkan adanya tekanan terhadap sumber daya alam dan perubahan penggunaan lahan yang berpotensi menyebabkan masalah lingkungan seperti penurunan kualitas air dan kehilangan habitat.

Dampak lain dari alih fungsi lahan ini adalah pada aspek kebencanaan dan sumber daya air. Kabupaten Kutai Timur memiliki proporsi lahan penyedia air yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan terhadap pengambilan air baku berada pada level yang mengkhawatirkan.

## **3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Timur meningkat dari 72,48 pada tahun 2022 menjadi 72,12 pada tahun 2023. Meskipun kecil peningkatan ini menunjukkan kemajuan positif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam mengatasi isu-isu lingkungan. Hal ini mencakup peningkatan manajemen sumber daya alam, pengurangan polusi, dan implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi lingkungan. Kemajuan ini penting, terutama mengingat

tekanan yang meningkat terhadap lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan pertumbuhan populasi.

Tabel 2.9 Capaian Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2023

Indeks	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>IKLH</b>	71,72	69,47	71,62	72,48	72,12
<b>IKA</b>	58	52,73	50,63	50,00	49,47
<b>IKU</b>	77,72	80,69	86,16	86,61	87,00
<b>IKTL/ IKL</b>	77,5	77,48	80,76	81,78	83,51
<b>IKL</b>	-	-	-	84,95	83,48
<b>Kategori</b>	Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Analisis terhadap data indeks lingkungan hidup dan kesejahteraan di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang beragam dalam berbagai aspek yang diukur. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami sedikit fluktuasi, dengan penurunan dari 71,72 pada tahun 2019 menjadi 69,47 pada tahun 2020, kemudian naik kembali hingga mencapai puncaknya pada 72,48 pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun ke 72,12 pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan variasi dalam kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pengelolaan lingkungan, aktivitas industri, dan perubahan iklim.

Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari 58 pada tahun 2019 menjadi 49,47 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air, yang bisa disebabkan oleh pencemaran, eksploitasi berlebihan, atau kebijakan pengelolaan air yang kurang efektif. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan yang konsisten, dari 77,72 pada tahun 2019 hingga mencapai 87,00 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya pengendalian polusi udara melalui penerapan regulasi yang lebih ketat, peningkatan pengawasan, serta inisiatif ramah lingkungan.

Indeks Kualitas Tanah dan Lahan (IKTL/IKL) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 77,5 pada tahun 2019 menjadi 83,51 pada tahun 2023. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL), yang baru mulai diukur pada tahun 2022, menunjukkan penurunan dari 84,95 pada tahun 2022 menjadi 83,48 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kategori penilaian kualitas lingkungan di Kabupaten Kutai Timur berada pada tingkat 'Baik' untuk sebagian besar periode, kecuali tahun 2020 yang tercatat sebagai 'Cukup Baik'. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada

beberapa tantangan dalam pengelolaan sumber daya air, Kabupaten Kutai Timur secara umum berhasil menjaga kualitas lingkungan hidupnya pada tingkat yang baik, dan terus menunjukkan perbaikan dalam aspek kualitas udara dan tanah. Upaya berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif akan sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.

#### 4. Indeks Resiko Bencana

Dampak lain dari alih fungsi lahan ini adalah pada aspek kebencanaan dan sumber daya air. Kabupaten Kutai Timur memiliki proporsi lahan penyedia air yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan terhadap pengambilan air baku berada pada level yang mengkhawatirkan. Sementara itu, risiko bencana seperti longsor, kebakaran, dan banjir tergolong tinggi, yang tercermin dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.10 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

IKD	IRB	TAHUN	KELAS RISIKO
0,00	190	2019	Tinggi
0,00	190	2020	Tinggi
0,26	190	2021	Tinggi
0,38	181,57	2022	Tinggi
0,36	185,17	2023	Tinggi

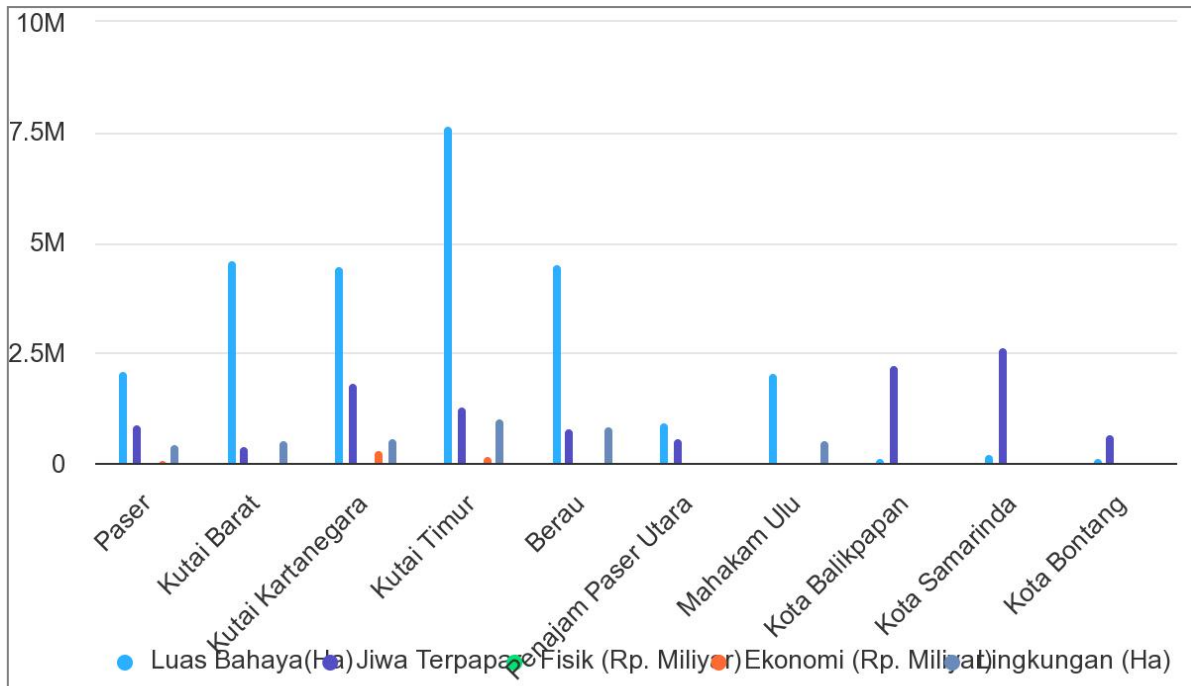
Sumber: BPBD Kabupaten Kutai Timur 2024

Analisis data IKD dan IRB di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang konsisten dalam kelas risiko tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020, IKD berada pada nilai 0,00 dengan IRB tetap di angka 190, menunjukkan bahwa meskipun risiko bencana teridentifikasi tinggi, kerentanan spesifik tidak tercatat atau belum dimasukkan dalam penilaian. Mulai tahun 2021, terdapat peningkatan nilai IKD menjadi 0,26 yang beriringan dengan IRB tetap di 190, menunjukkan bahwa ada peningkatan pengakuan terhadap faktor-faktor kerentanan yang mempengaruhi risiko bencana.

Pada tahun-tahun berikutnya, nilai IKD terus meningkat, mencapai 0,38 pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 0,36 pada tahun 2023, sementara IRB mengalami penurunan menjadi 181,57 pada tahun 2022 dan kemudian naik sedikit menjadi 185,17 pada tahun 2023. Peningkatan nilai IKD mencerminkan peningkatan pengakuan dan pencatatan faktor-faktor kerentanan di daerah tersebut, sementara perubahan dalam IRB menunjukkan dinamika risiko bencana yang tetap tinggi namun sedikit berfluktuasi. Meskipun demikian, keseluruhan kelas risiko tetap berada pada tingkat tinggi, menandakan perlunya strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengurangi kerentanan dan

risiko di masa mendatang. Penurunan IRB pada tahun 2022 dapat menunjukkan adanya upaya mitigasi yang mulai menunjukkan hasil, namun peningkatan kembali pada tahun 2023 menegaskan bahwa upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan dinamika kerentanan yang ada.

Gambar 2. 2 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur



Sumber: inarisk.bnpb.go.id

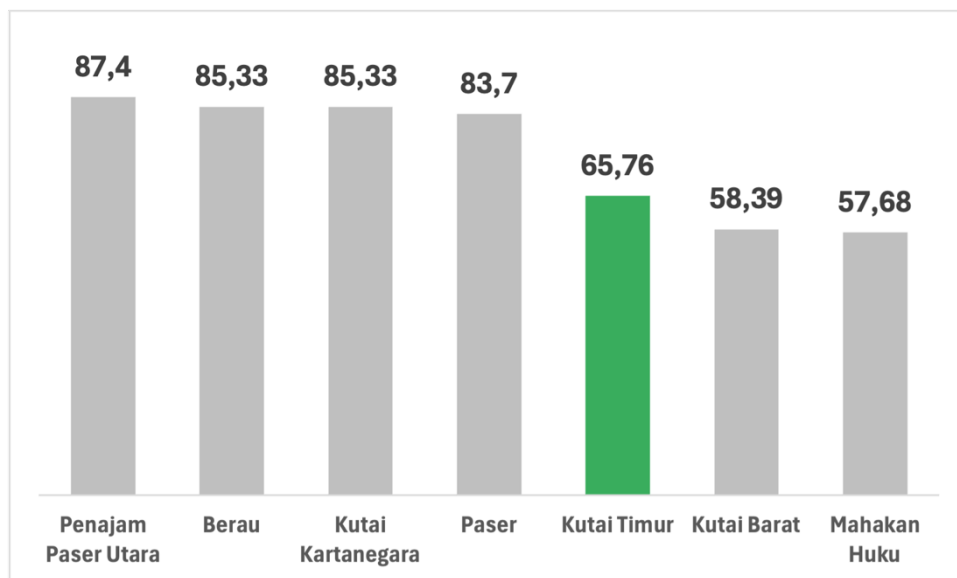
Berdasarkan data RIPB yang diterbitkan BNPB, terdapat beberapa bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kutai Timur, diantaranya adalah gempa bumi. Terdapat Tiga zona sesar utama yang telah diidentifikasi di Pulau Kalimantan yaitu sesar Tarakan, sesar Mangkalihat, dan sesar Meratus. Sesar-sesar tersebut dapat berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo 7,00. Bencana yang lain yang memiliki kemungkinan terjadi di Kabupaten Kutai Timur adalah abrasi, gelombang ekstrim, serta kekeringan.

### 5. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam bidang ketahanan pangan, data indeks ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional menggambarkan dari 7 kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki ketahanan pangan dengan skor 85,33 disusul kabupaten Penajam Paser Utara 87,40, Kutai Kartanegara 85,53, Paser 83,70, Kutai Barat 58,39, Kutai Timur 65,76 , Mahakam Ulu 57,68. Skor indeks ketahanan pangan Kutai Timur relatif lebih

rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur, menggambarkan adanya kekurangan dalam beberapa aspek penting yang berkontribusi pada ketahanan pangan, seperti ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan.

Gambar 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kutai Timur



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2023

Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023. Data ini memberikan gambaran mengenai fluktuasi yang terjadi dalam ketahanan pangan di wilayah tersebut, yang menunjukkan berbagai dinamika dan tantangan dalam menjaga kestabilan dan keamanan pangan. Pemantauan secara terus-menerus dan analisis mendalam terhadap data ini sangat penting untuk memahami tren dan penyebab utama dari perubahan dalam ketahanan pangan, serta untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Berikut adalah tabel yang menyajikan data Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 2.11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kutai Timur	57,58	73,13	66,19	60,09	65,76

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2024

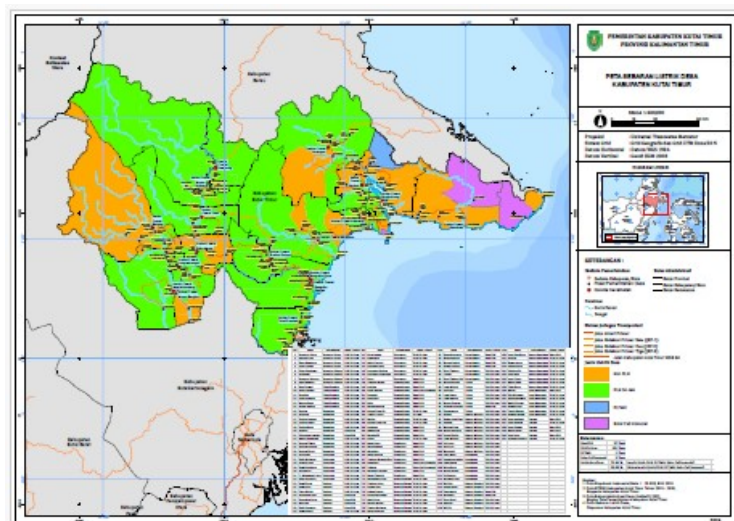
Analisis data Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, indeks berada di angka 57,58 yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang relatif rendah. Indeks ini

kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 mencapai 73,13, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam ketahanan pangan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 66,19, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah di angka 60,09 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, indeks kembali meningkat menjadi 65,76, namun belum mencapai angka tertinggi yang dicapai pada tahun 2020. Fluktuasi ini mencerminkan adanya variabilitas dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Untuk mencapai stabilitas ketahanan pangan, diperlukan upaya berkelanjutan dan strategi yang adaptif terhadap perubahan kondisi tersebut.

## 6. Indeks Ketahanan Energi

Dari sisi indeks ketahanan energi, Dewan Energi Nasional (DEN) menghitung indeks ketahanan energi Indonesia dengan menggunakan empat indikator utama: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan akseptabilitas. Setiap indikator ini mencakup ketersediaan sumber dan pasokan energi, akses terhadap pasokan, harga, dan penerimaan masyarakat terhadap infrastruktur energi. Kutai Timur dalam sektor energi Indonesia, terutama dalam ekstraksi batu bara dan sumber daya alam lainnya merupakan lumbung energi, namun terdapat tantangan bagaimana menyeimbangkan kebutuhan energi industri dengan keberlanjutan lingkungan dan transisi menuju sumber energi yang lebih terbarukan. Kabupaten Kutai Timur juga harus berfokus pada peningkatan infrastruktur energi untuk memastikan akses yang andal bagi populasi dan industri.

Gambar Peta Kelistrikan Desa Kutai Timur 2024



Sumber: Bappeda Kutai Timur 2024

Berdasarkan peta kelistrikan desa di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024, terlihat bahwa distribusi kelistrikan di daerah tersebut telah mencapai kemajuan signifikan. Sebanyak

101 desa telah teraliri listrik dari PLN selama 24 jam penuh, menunjukkan bahwa mayoritas wilayah telah mendapatkan akses listrik yang memadai. Desa-desa ini tersebar di berbagai kecamatan, seperti Sangatta Utara, Teluk Pandan, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, dan Muara Wahau. Selain itu, terdapat satu desa yang menggunakan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), serta tiga desa lainnya yang memanfaatkan solar cell komunal sebagai sumber energi listrik. Hal ini menunjukkan upaya diversifikasi sumber energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan penyediaan listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Namun, masih terdapat 37 desa yang belum teraliri listrik dari PLN, PLTMH, atau solar cell komunal. Desa-desa ini sebagian besar terletak di daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang masih harus dihadapi dalam mencapai pemerataan akses listrik di seluruh Kabupaten Kutai Timur. Meskipun demikian, dengan 73.94% desa yang telah teraliri listrik, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan perkembangan positif. Adapun 26.06% desa yang belum teraliri listrik menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan agar seluruh wilayah dapat menikmati manfaat listrik yang memadai. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **D. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)**

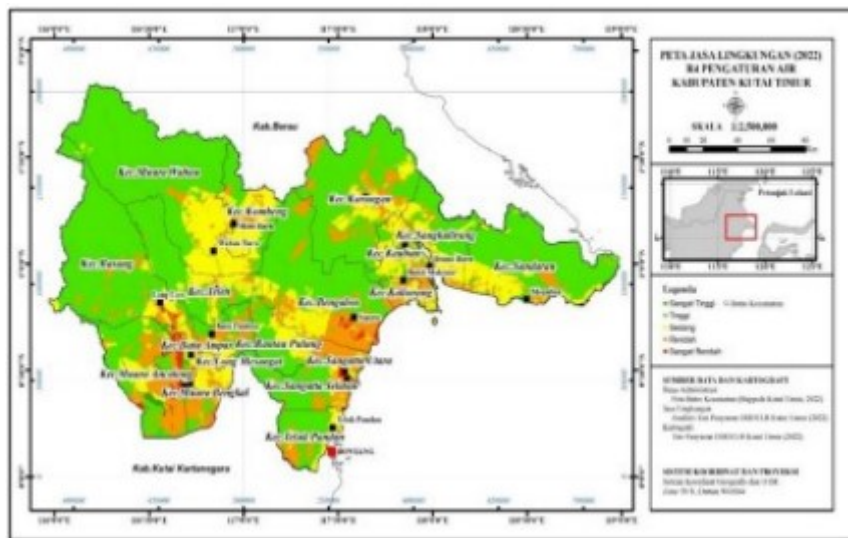
Daya dukung dan daya tampung lingkungan berfungsi untuk menilai kemampuan suatu ekosistem dalam menopang aktivitas manusia tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Daya dukung merujuk pada kapasitas lingkungan untuk mendukung populasi manusia, hewan, atau tanaman tertentu secara berkelanjutan. Daya tampung, di sisi lain, adalah batas maksimum pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kedua konsep ini penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam

Dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Kutai Timur menerapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, dengan menerapkan konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Ini termasuk dalam RPJMD Kutai Timur 2025-2029 yang menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem alami. Konsep ini tidak hanya sebagai aspek teknis, tetapi juga nilai fundamental dalam pembuatan kebijakan dan

program, memperhatikan sumber daya alam, kualitas air, udara, dan faktor lingkungan lainnya yang penting untuk keberlanjutan daerah.

Kabupaten Kutai Timur mampu menyediakan jasa ekosistem berupa Jasa Lingkungan Penyedia Air (P1) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 2,60% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 26.873,28 Hektar), Rendah sebesar 33,84% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 121.551,88 Hektar), Sedang sebesar 61,93% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 375.835,98 Hektar), Tinggi sebesar 1,21% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 27.624,05 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,41% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 2.672,83 Hektar).

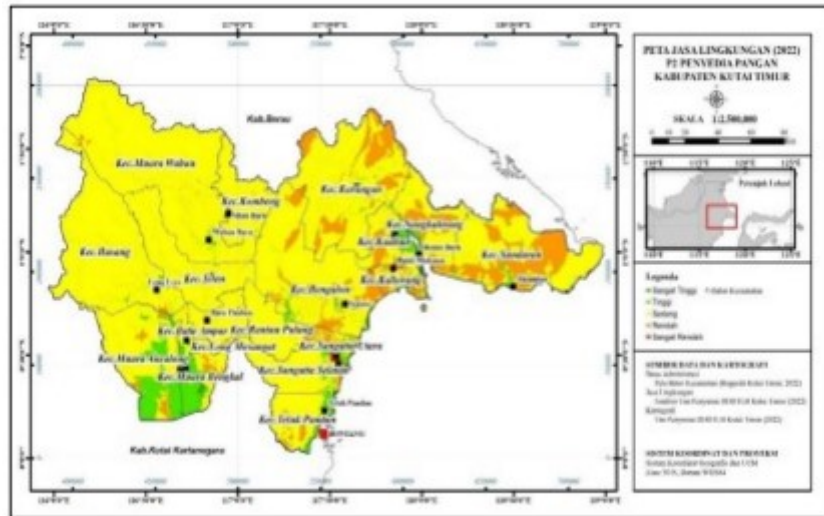
Gambar 2. 4 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (P1) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas LH Kutim 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 0,002% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 65,65 Hektar), Rendah sebesar 11,69% (didominasi Kecamatan Sandaran seluas 108.809,40 Hektar), Sedang sebesar 82,15% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 491.919,19 Hektar), Tinggi sebesar 5,71% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 68.116,68 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,44 % (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 4.077,07 Hektar).

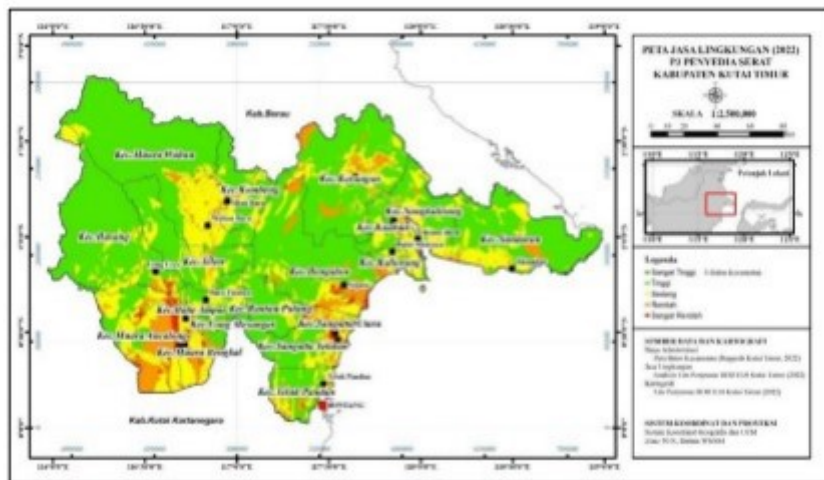
Gambar 2. 5 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas LH Kutim 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Serat (P3) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 1,35% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 13.146,83 Hektar), Rendah sebesar 9,18% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 80.692,56 Hektar), Sedang sebesar 24,57% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 108.583,92 Hektar), Tinggi sebesar 64,99% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 376.195,90 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0% (Tidak ada Kecamatan yang masuk kategori sangat tinggi).

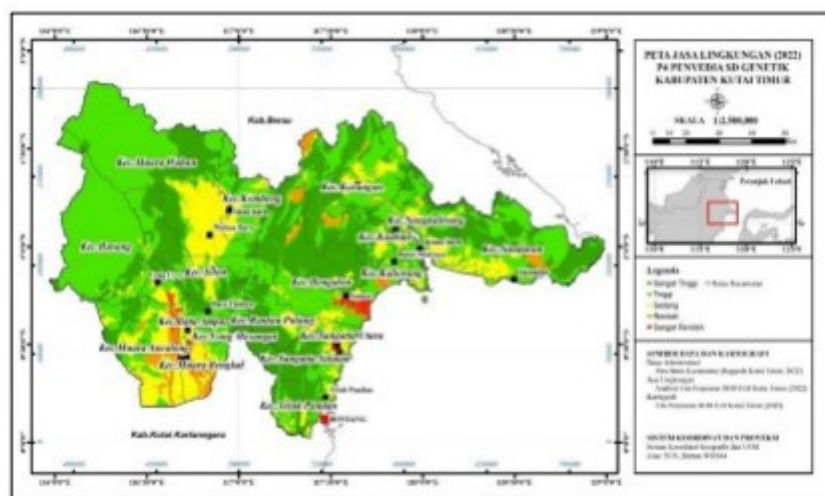
Gambar 2. 6 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat (P3) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas LH Kutim 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik (P4) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 0,77% (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 13.631,37 Hektar), Rendah sebesar 3,96% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 34.774,47 Hektar), Sedang sebesar 16,11% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 99.260,19 Hektar), Tinggi sebesar 47,12% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 285.402,88 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 32,04 % (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 179.203,68 Hektar).

Gambar 2. 7 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik (P4) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas LH Kutim 2023

## E. Perubahan Iklim

Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2001, Indonesia memiliki 93,8 juta hektar hutan primer, namun pada tahun 2020, area tersebut telah berkurang sekitar 10 persen. Proporsi utama emisi Kalimantan Timur berasal dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF), serta dekomposisi lahan gambut yang berkontribusi sebesar 85 persen dari total emisi saat ini. Dalam skenario *business as usual*, laju emisi diperkirakan tumbuh pada tingkat 1,4 persen per tahun, menghasilkan total emisi sebesar 331 MtCO<sub>2</sub>e pada tahun 2030.

Kabupaten Kutai Timur mengalami dampak signifikan dari perubahan iklim yang dipicu oleh *deforestasi*. Pembukaan hutan yang masif di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur, telah menyebabkan peningkatan suhu. Di Kabupaten Berau, misalnya, pembukaan hutan seluas 4.375 kilometer persegi meningkatkan suhu maksimum harian sebesar 0,95 derajat Celcius antara tahun 2002 dan 2018.

Peningkatan suhu di Kutai Timur tidak hanya menyebabkan lingkungan menjadi lebih panas, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kondisi kerja di luar ruangan menjadi lebih berbahaya, dengan risiko meningkatnya angka kematian akibat panas ekstrem. Selain itu, perubahan iklim juga memicu cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan banjir, yang semakin sering terjadi di daerah ini. Banjir dan tanah longsor mengganggu kehidupan sehari-hari dan perekonomian, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan masyarakat.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan Strategi Pertumbuhan Rendah Karbon. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dari sektor-sektor ekonomi utama, beralih ke kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi yang menghasilkan emisi lebih rendah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Upaya ini termasuk kebijakan "zero burning" dalam pembukaan lahan, penggunaan lahan terdegradasi untuk ekspansi perkebunan, dan program reboisasi serta konservasi hutan yang terdegradasi.

### 2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Kutai Timur berdasarkan data BPS 2024 berjumlah 455.504 jiwa pada tahun 2023. Dalam konteks pembangunan, penduduk memiliki peran ganda, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam kapasitas sebagai subjek pembangunan, penduduk berperan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebagai objek pembangunan, penduduk menjadi fokus dan penerima manfaat dari berbagai program pembangunan.

Tabel 2.12 Kondisi Demografi Kutai Timur

No	Variabel	Nilai
1	Jumlah Penduduk (Ribu)	455.504
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,90%
3	Persentase Penduduk	100%
4	Kepadatan Penduduk Per KM2	14,58
5	Rasio Jenis Kelamin	115,90

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, BPS 2024

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 0,90% per tahun, menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Kondisi ini bermanfaat dalam mengelola sumber daya dan melakukan perencanaan wilayah tanpa memberikan tekanan mendadak pada sistem

sosial dan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih fokus dan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk yang tercatat adalah 14,58 jiwa per kilometer persegi, menggambarkan bahwa Kutai Timur memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang geografis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut dan penyebaran yang lebih merata, yang pada gilirannya dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Aspek penting lainnya adalah rasio jenis kelamin, di mana terdapat 115,90 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan norma umum, yang bisa menggambarkan dominasi jumlah laki-laki dalam demografi. Rasio jenis kelamin yang tidak seimbang ini dapat berdampak pada isu sosial jangka panjang, termasuk ketidakseimbangan dalam kesempatan kerja dan dinamika kehidupan keluarga, serta potensi ketidakseimbangan dalam beberapa sektor tenaga kerja.

Secara umum Kabupaten Kutai Timur memiliki peluang untuk mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Namun, kondisi ini juga dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi ketidakseimbangan gender. Oleh karena itu, kondisi demografis yang ada perlu diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan daerah untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kutai Timur adalah wilayah yang heterogen, yang dihuni dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam konteks masyarakat adat, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki suku asli yang telah berdiam sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Masyarakat adat di Kutai Timur memiliki kearifan lokal yang kaya dan bersejarah, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka. Salah satu contoh penting adalah "Pelas Tanah", sebuah pesta adat yang diselenggarakan setiap tahun. Pelas Tanah memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari tradisi kerajaan Kutai Martadipura, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sejak sekitar abad ke-4. Kerajaan ini, dikenal juga sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura, memiliki sejarah yang merupakan salah satu yang tertua di Nusantara.

Selain itu, terdapat upaya khusus untuk mengembangkan dan memantapkan potensi budaya masyarakat adat Wehea Kelay di Kutai Timur sebagai destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan destinasi wisata utama di Kutai Timur dengan fokus pada pengembangan wisata sosial budaya. Strategi pengembangannya meliputi studi kajian untuk mengembangkan potensi wisata budaya dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata masyarakat adat Wehea Kelay.

Kedua aspek ini, Pelas Tanah dan pengembangan Wehea Kelay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat Kutai Timur tidak hanya mempertahankan budaya mereka yang kaya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dan mengintegrasikan warisan budaya tersebut ke dalam konteks modern, khususnya pariwisata, untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi mereka.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya**

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029, aspek kesejahteraan masyarakat mendapat tempat penting sebagai salah satu pilar dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang secara kolektif menentukan kualitas hidup dan kepuasan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat berfungsi untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini. Informasi ini akan menjadi landasan penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan jangka panjang daerah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kondisi saat ini, sub-bab ini akan menggambarkan tantangan dan peluang yang ada di Kutai Timur dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

Gambaran Aspek Kesejahteraan Masyarakat ini tidak hanya memberikan gambaran tentang keadaan saat ini, tetapi juga membantu dalam merencanakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi Kabupaten Kutai Timur.

### **2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2025-2029, karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi ditinjau melalui berbagai indikator, yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi secara komprehensif. Indikator-indikator utama yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Rasio, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 - 2023

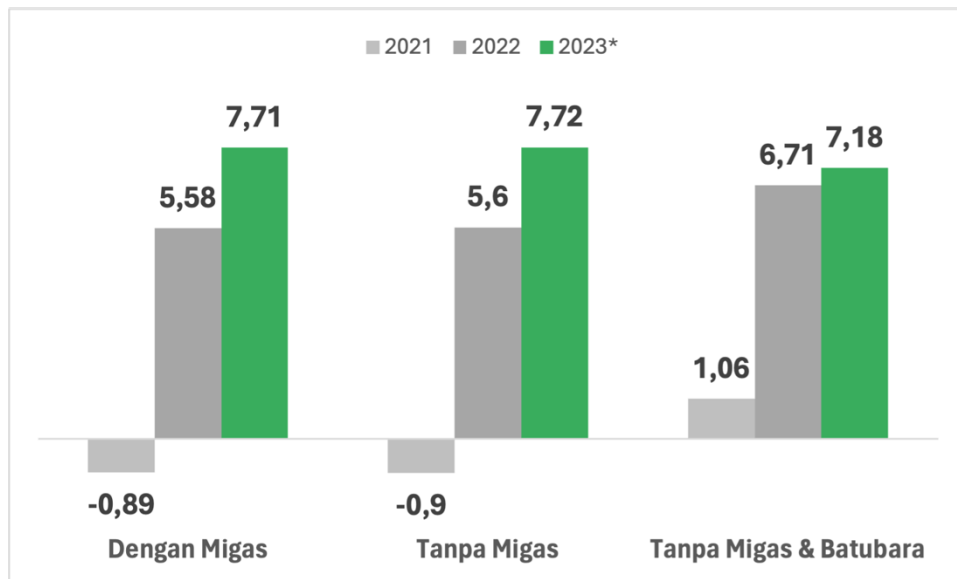
Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
2019	8,17		
2020	-3,08		
2021	-0,89	-0,90	1,06
2022	5,58	5,60	6,71
2023	7,71	7,72	7,18

Sumber: Evaluasi RPJPD Kutim 2005-2025 (data diolah)

Pada tahun 2019, LPE dengan Migas tercatat sebesar 8,17%, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh sektor migas. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian, menyebabkan LPE dengan Migas turun drastis menjadi -3,08%. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang lambat dengan LPE sebesar -0,89%, dan ketika sektor migas tidak diperhitungkan, pertumbuhan ekonomi sedikit lebih rendah pada -0,90%. Namun, tanpa sektor migas dan batubara, LPE justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,06%, menandakan bahwa sektor-sektor non-migas dan non-batubara memberikan kontribusi yang stabil terhadap perekonomian.

Pada tahun 2022, LPE kembali menunjukkan peningkatan signifikan dengan angka 5,58% untuk LPE dengan Migas, 5,60% tanpa Migas, dan 6,71% tanpa Migas & Batubara. Ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan diversifikasi sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas dan batubara. Tahun 2023 melanjutkan tren positif dengan LPE sebesar 7,71% dengan Migas, 7,72% tanpa Migas, dan 7,18% tanpa Migas & Batubara. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kutai Timur berhasil pulih dan bahkan tumbuh lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya, dengan kontribusi yang semakin signifikan dari sektor-sektor di luar migas dan batubara. Diversifikasi ini penting untuk ketahanan ekonomi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Gambar 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kutai Timur 2021-2023



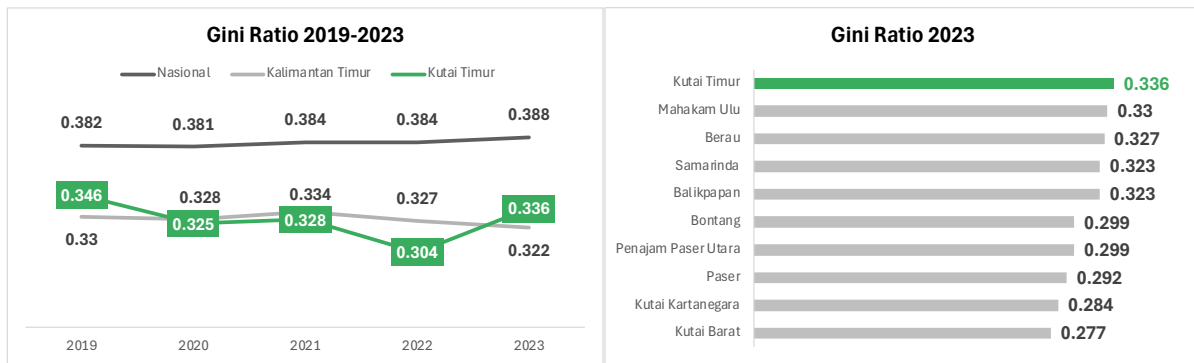
Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2024

Secara umum bahwa ekonomi Kabupaten Kutai Timur sangat dinamis dan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, khususnya ketika sektor migas dan batubara tidak dominan. Hal ini menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi global dan domestik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat terus mendorong kebijakan yang inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## B. Indeks Gini

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Gini Ratio dihitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada interval 0 sampai dengan 1, semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Sebaliknya, semakin dekat Gini Ratio dengan angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan.

Gambar 2. 9 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur 2019-2023



Sumber: Kutim Dalam Angka 2024 (BPS Kabupaten Kutai Timur)

Pada tahun 2019, Kabupaten Kutai Timur mencatat nilai Indeks Gini sebesar 0,346. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang moderat dalam distribusi pendapatan di antara penduduk Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai Indeks Gini menjadi 0,325, yang menandakan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai program pembangunan dan kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit kenaikan nilai Indeks Gini menjadi 0,328. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan sektor yang sangat tergantung pada aktivitas harian.

Pada tahun 2022, nilai Indeks Gini mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,304, mencerminkan pemerataan pendapatan yang lebih baik di antara penduduk. Ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi dan redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial atau kebijakan fiskal telah memberikan dampak positif terhadap kesetaraan ekonomi.

Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan nilai Indeks Gini kembali menjadi 0,336. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa ada sedikit pelemahan dalam upaya pemerataan pendapatan yang sebelumnya terjadi. Hal ini terkait dengan dinamika ekonomi global atau nasional yang mempengaruhi perekonomian lokal, termasuk fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi pendapatan sektor tertentu.

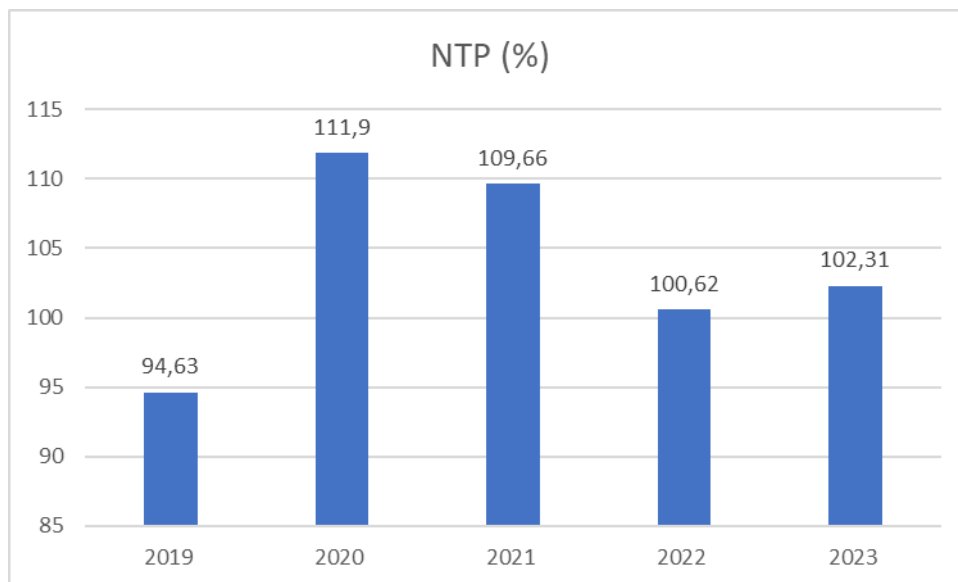
Secara keseluruhan, data Indeks Gini dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang terjadi dalam tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Timur. Ini memerlukan perhatian dan strategi yang berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya-upaya

seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan penguatan sektor ekonomi mikro dan kecil perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua warga.

### C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani atas hasil produksinya dengan indeks harga yang harus dibayar petani untuk kebutuhan konsumsi dan produksinya. NTP merupakan salah satu parameter penting untuk mengukur kesejahteraan petani. Nilai NTP di atas 100 berarti petani menerima pendapatan yang lebih tinggi dari biaya produksi, sedangkan nilai di bawah 100 menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani lebih rendah dari biaya produksi.

Gambar 2. 10 Nilai Tukar Petani Kabupaten Kutai Timur 2019-2023



Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur 2023

Pada tahun 2019, NTP Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 94,63%, yang menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Kutai Timur mengalami defisit dalam hal penerimaan pendapatan dibandingkan dengan biaya produksi dan konsumsi. Ini menandakan bahwa petani menghadapi kesulitan ekonomi, dimana harga jual hasil produksi mereka tidak mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan lainnya.

Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2020 dengan NTP mencapai 111,9%. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam rasio harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga yang harus mereka bayar. Peningkatan ini bisa jadi akibat dari kebijakan

pemerintah yang mendukung harga produk pertanian, juga karena peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam produksi pertanian.

Pada tahun 2021, NTP sedikit menurun menjadi 109,66%. Meskipun terjadi penurunan, nilai ini masih menunjukkan bahwa petani di Kutai Timur berada pada posisi yang menguntungkan secara ekonomi, dimana mereka masih menerima pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan.

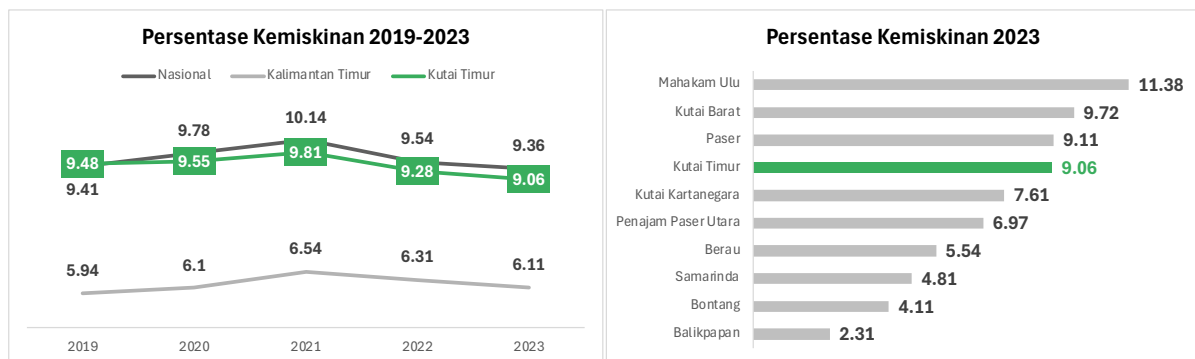
Di tahun 2022, NTP turun kembali ke angka 100,62%, yang berarti hampir seimbang antara pendapatan dan biaya produksi petani. Ini mengindikasikan stabilisasi harga pasar atau peningkatan biaya produksi yang harus ditanggung petani.

Terjadi kenaikan ringan pada NTP di tahun 2023 menjadi 102,31%, menunjukkan bahwa petani kembali mengalami kondisi yang sedikit lebih menguntungkan. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan harga jual produk pertanian atau adanya intervensi pemerintah dalam stabilitas harga.

Dari data tahun 2019 hingga 2023, terlihat fluktuasi nilai NTP di Kabupaten Kutai Timur, yang mencerminkan dinamika pasar dan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh petani. Secara umum, kecuali pada tahun 2019, petani di Kutai Timur cenderung mengalami kondisi ekonomi yang relatif menguntungkan.

#### D. Angka Kemiskinan

Tabel kemiskinan dibawah ini memberikan informasi penting mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 sampai 2023. Data ini mencakup berbagai aspek kemiskinan, termasuk garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Setiap indikator ini memberikan perspektif yang berbeda tentang masalah kemiskinan dan membantu untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang rentan secara ekonomi.



Tabel 2.14 Perkembangan Penduduk Miskin 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Garis Kemiskinan	Rp			626.492	659.136	714.24
2	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa			37,78	36,84	37,04
3	Persentase Penduduk Miskin	%	9,40	9,55	9,81	9,28	9,06
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks			1,64	2,33	1,20
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks			0,44	0,78	0,28

Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 (diolah)

### 1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pada tahun 2021, garis kemiskinan berada pada Rp 626.492 dan meningkat menjadi Rp 659.136 pada tahun 2022, serta lebih lanjut naik menjadi Rp 714.241 pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya inflasi atau peningkatan biaya hidup yang mempengaruhi standar kebutuhan pokok.

### 2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kutai Timur menunjukkan penurunan dari 37,78 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 36,84 ribu jiwa pada tahun 2022, namun naik sedikit menjadi 37,04 ribu jiwa pada tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal dan dampak dari kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

### 3. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terdapat tren penurunan dari 9,40% pada tahun 2019 menjadi 9,28% pada tahun 2022, dan turun lagi menjadi 9,06% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengentasan kemiskinan.

### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

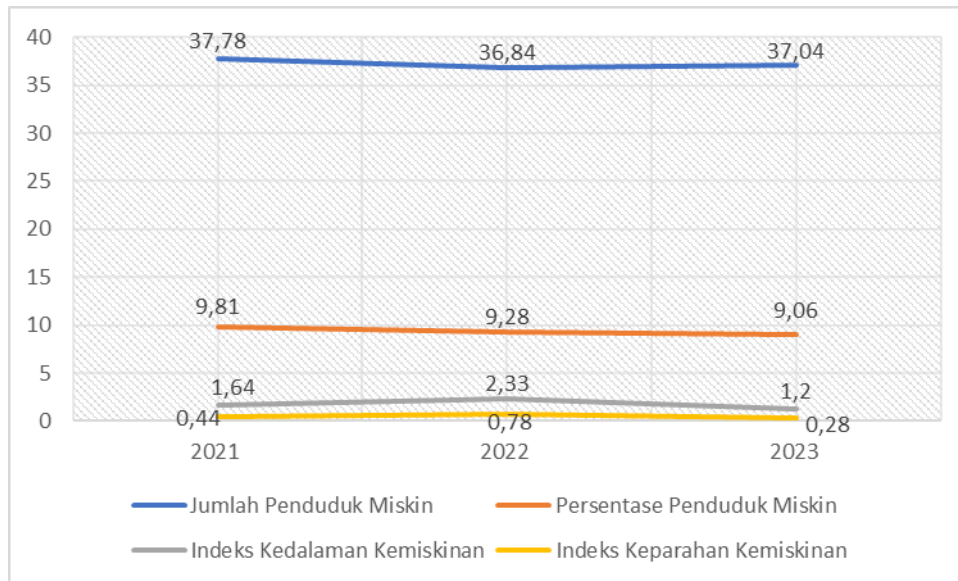
Indeks ini mengukur seberapa dalam rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Nilai indeks naik dari 1,64 pada tahun 2021 menjadi 2,33 pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan meningkat selama periode tersebut, tetapi kemudian turun menjadi 1,20 pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan.

### 5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks ini mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin. Terjadi kenaikan dari 0,44 pada tahun 2021 menjadi 0,78 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 0,28 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan di antara

penduduk miskin telah berkurang, mengindikasikan efektivitas intervensi sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Tabel 2.15 Kemiskinan Kutai Timur 2021-2023



Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 (diolah)

Data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur telah membuat kemajuan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan di antara mereka yang masih hidup dalam kemiskinan. Meskipun terdapat fluktuasi dalam indeks kedalaman kemiskinan, tren umum menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi penduduk miskin. Kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk pengentasan kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pengembangan infrastruktur, perlu terus diperkuat untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai.

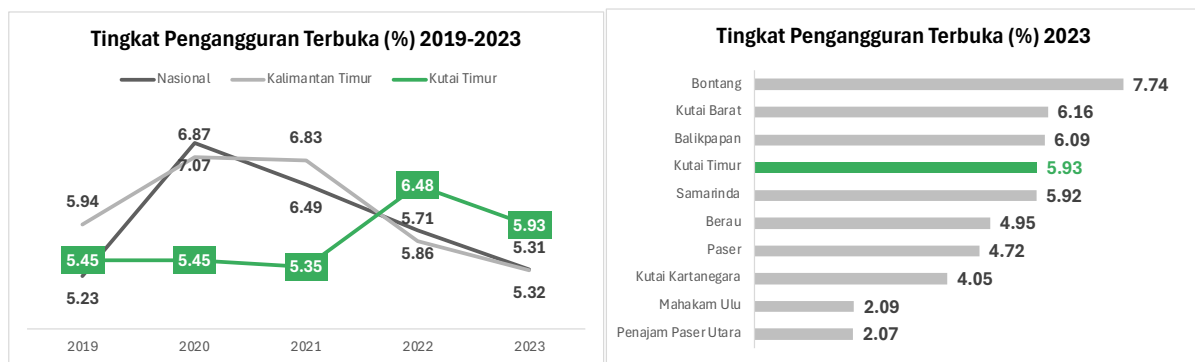
### E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator kunci dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara, khususnya dalam konteks pasar tenaga kerja. TPT diukur sebagai persentase dari jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Pengangguran terbuka mengacu pada individu yang aktif mencari pekerjaan namun tidak dapat menemukan pekerjaan, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Hubungan antara TPT dan angkatan kerja adalah aspek penting dalam analisis ekonomi. Angkatan kerja mencakup semua individu yang memenuhi syarat dan bersedia untuk bekerja, termasuk mereka yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Ketika ekonomi berkembang, angkatan kerja cenderung bertambah karena lebih banyak orang termotivasi

untuk mencari pekerjaan, mengingat adanya peluang kerja yang lebih baik. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup, maka TPT akan meningkat. Secara keseluruhan, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang sangat penting untuk memahami kondisi pasar kerja dan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh populasi yang bekerja.

Gambar TPT Kutai Timur dan Kalimantan Timur 2023



Sumber: Evaluasi RPJPD Kutim 2005-2025 (diolah)

Grafik pertama menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan nasional selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, TPT di Kutai Timur berada di bawah rata-rata nasional dan Kalimantan Timur, dengan angka 5,23%. Namun, pada tahun 2020, TPT di Kutai Timur naik signifikan menjadi 7,07%, melebihi rata-rata nasional (5,45%) dan Kalimantan Timur (6,87%). Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2021, TPT di Kutai Timur turun menjadi 6,49%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022, di mana TPT di Kutai Timur mencapai 5,71%. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali menjadi 5,93%, meskipun angka ini masih lebih rendah dari tahun 2020. Data ini mencerminkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, termasuk upaya pemulihan dari pandemi.

Grafik kedua menunjukkan perbandingan TPT di Kutai Timur dengan kabupaten lain di Kalimantan Timur pada tahun 2023. Kutai Timur dengan TPT sebesar 5,93% berada di posisi tengah, lebih rendah dibandingkan dengan Bontang (7,74%), Kutai Barat (6,16%), dan Balikpapan (6,09%). Namun, TPT Kutai Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten seperti Berau (4,95%), Paser (4,72%), dan Penajam Paser Utara yang memiliki TPT terendah (2,07%). Posisi Kutai Timur ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penurunan pengangguran, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi TPT agar bisa lebih kompetitif

dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur. Upaya ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

#### F. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPM adalah ukuran yang komprehensif untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah, menggabungkan tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator kemajuan ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dari kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya.

Dalam dokumen RPJMD ini, IPM Kutai Timur dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Fokus utamanya adalah pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta peningkatan pendapatan dan standar hidup penduduk. Melalui pengukuran IPM, Pemerintah Daerah Kutai Timur dapat menilai efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan, sekaligus merencanakan strategi pembangunan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan utama pemanfaatan IPM dalam RPJMD adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan mampu berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur secara menyeluruh, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dua dekade kedepan, indikator IPM akan digantikan dengan indikator baru, yaitu Indikator Modal Manusia atau *Human Capital Indicator (HCI)*.

Tabel 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023

No	I P M	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,76	73,16	73,46	73,47	73,57
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,18	9,19	9,43	9,44	9,45
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun			12,90	13,00	13,01
4.	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan	Ribu rupiah			10.868	11.322	11.961
5.	IPM	Indeks	73,49	73,00	73,81	74,35	74,98

Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur 2023

Angka harapan hidup di Kutai Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun tidak terlalu signifikan, dari 73,46 tahun pada tahun 2021 menjadi 73,47 tahun pada

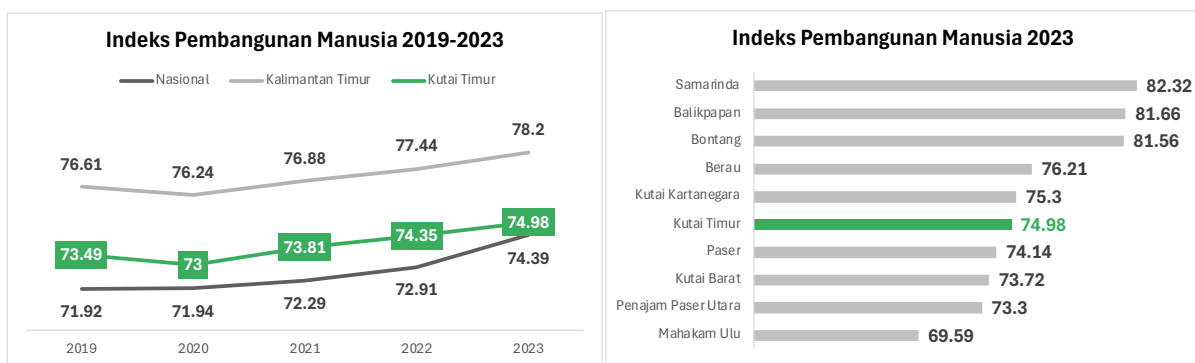
tahun 2022, dan naik lebih lanjut menjadi 73,57 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan dan kualitas hidup penduduk.

Rata-rata lama sekolah yang menjadi indikator penting dalam mengukur akses dan kualitas pendidikan juga mengalami peningkatan yang sangat kecil dari 9,43 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,44 tahun pada tahun 2022, dan sedikit naik menjadi 9,45 tahun pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya minimal, hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam penyediaan dan penggunaan pendidikan formal oleh penduduk.

Harapan lama sekolah, yang menggambarkan ekspektasi jangka panjang terhadap pendidikan anak usia sekolah, menunjukkan tren peningkatan yang lebih jelas. Pada tahun 2021 nilai ini adalah 12,90 tahun, meningkat menjadi 13,00 tahun pada tahun 2022, dan naik sedikit lagi menjadi 13,01 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan optimisme terhadap akses dan partisipasi dalam pendidikan yang lebih tinggi.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk serta standar hidup. Terjadi peningkatan dari Rp 10.868.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 11.322.000 pada tahun 2022, dan naik lebih lanjut menjadi Rp 11.961.000 pada tahun 2023. Kenaikan ini menandakan peningkatan daya beli dan kondisi ekonomi penduduk yang lebih baik.

Gambar 2. 11 IPM Kabupaten Kutai Timur 2019-2023



Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur 2023

Secara keseluruhan, IPM di Kutai Timur menunjukkan tren peningkatan dari 73,81 pada tahun 2021 menjadi 74,35 pada tahun 2022, dan meningkat lebih signifikan menjadi 74,98 pada tahun 2023. Peningkatan IPM ini mencerminkan kemajuan terintegrasi dari berbagai dimensi di atas, menandakan adanya peningkatan kualitas hidup dan capaian pembangunan manusia secara lebih luas di Kabupaten Kutai Timur.

Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Walaupun

peningkatan dalam beberapa indikator terlihat minimal, tren secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pemerintah daerah harus terus memperkuat kebijakan dan program di sektor-sektor tersebut untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

## **2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

### **A. Indeks Keluarga Sehat**

Indeks Keluarga Sehat memegang peranan penting dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Timur. Sebagai indikator komprehensif yang mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga, indeks ini memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kesehatan dan kesejahteraan di tingkat lokal, yang sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan publik.

Pada tahun 2023, data dari Dinas Kesehatan Kutai Timur, Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, yaitu 18. Angka ini mencerminkan rendahnya tingkat kesehatan keluarga di wilayah tersebut dibandingkan dengan standar yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks ini adalah tingginya prevalensi merokok di antara anggota keluarga. Merokok dikenal sebagai salah satu perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan, tidak hanya bagi perokok itu sendiri tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya melalui paparan asap rokok pasif.

Kebiasaan merokok yang tinggi dalam keluarga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penyakit yang berhubungan dengan rokok, seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan kronis, berpotensi meningkat, yang pada akhirnya dapat membebani sistem kesehatan di Kutai Timur. Untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi kebiasaan merokok. Kampanye kesadaran kesehatan, penyuluhan tentang bahaya merokok, serta program penghentian merokok harus digalakkan. Selain itu, regulasi yang lebih ketat mengenai kawasan tanpa rokok dan peningkatan akses ke layanan kesehatan yang mendukung penghentian merokok juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.

## B. Indeks Kualitas Keluarga

Tabel 2.17 Indeks Ketahanan Kualitas Kalimantan Timur dan Nasional 2022

No	Cakupan	Satuan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
1	KALIMANTAN TIMUR	Indeks	88,96	81,82	74,89	68,37	60,38	77,11
2	NASIONAL		87,45	78,66	73,08	70,00	67,17	76,53

Sumber: [siga.kemepppa.go.id](http://siga.kemepppa.go.id)

Analisis Indeks Kualitas Keluarga di Kalimantan Timur dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional mengungkapkan berbagai dimensi penting yang mencerminkan ketahanan keluarga. Dalam konteks legalitas-struktural, Kalimantan Timur menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional, menggambarkan bahwa terdapat fondasi yang lebih kuat dalam aspek-aspek legal dan struktur sosial yang mendukung keluarga. Hal ini dapat diartikan sebagai cerminan akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum, keamanan hak properti, dan dukungan struktur keluarga yang lebih mapan.

Terkait dengan ketahanan fisik, Kalimantan Timur juga mencatat skor yang lebih baik, mengimplikasikan ketersediaan sumber daya kesehatan dan nutrisi yang lebih memadai, yang berkontribusi pada kesejahteraan fisik keluarga. Aspek ketahanan ekonomi, yang hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, menunjukkan bahwa keluarga di Kalimantan Timur memiliki stabilitas ekonomi atau akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih baik.

Namun, dalam komponen ketahanan sosial-psikologis, Kalimantan Timur tercatat memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai nasional. Ini menandakan adanya tantangan dalam jaringan dukungan sosial, ketersediaan sumber daya kesehatan mental, atau koherensi komunitas yang kurang optimal. Selanjutnya, dalam komponen ketahanan sosial-budaya, Kalimantan Timur mencatat skor yang signifikan lebih rendah, menandakan area yang perlu ditingkatkan dalam keterlibatan budaya, tradisi sosial, dan integrasi nilai-nilai budaya dalam keluarga.

Meskipun terdapat kekurangan dalam komponen sosial-psikologis dan sosial-budaya, total nilai indeks ketahanan keluarga di Kalimantan Timur masih sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, ketahanan keluarga di Kalimantan Timur memiliki kapasitas yang sedikit lebih tinggi.

### C. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak dalam RPJMD menjadi fondasi untuk membangun strategi jangka menengah yang bertujuan untuk menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan positif, sesuai dengan hak asasi dan kebutuhan mereka yang fundamental.

Dari data yang dirilis oleh KemenPPPA dan Bappenas, Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Timur tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Indeks Perlindungan Anak 2022

Kabupaten	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Kutai Timur	47,70	77,85	74,48	34,54	72,61	62,26

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang mencerminkan sejauh mana hak-hak anak dipenuhi dan dilindungi di suatu wilayah. IPA untuk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 62,26. Nilai ini disusun dari lima dimensi yang mengevaluasi aspek-aspek berbeda dari perlindungan anak.

#### Indeks D1: Hak Sipil dan Kebebasan

Nilai untuk Hak Sipil dan Kebebasan adalah 47,70, yang merupakan nilai terendah di antara indikator lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan dalam mengakui dan melindungi hak-hak sipil anak-anak di Kutai Timur, seperti identitas hukum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi.

#### Indeks D2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dimensi kedua mencatat nilai 77,85, menunjukkan bahwa Kutai Timur telah memiliki praktik yang relatif baik dalam menyediakan lingkungan keluarga yang mendukung dan pengasuhan alternatif ketika diperlukan. Ini mencerminkan upaya yang baik dalam memelihara hubungan keluarga yang kuat dan pengasuhan yang berpusat pada anak.

### **Indeks D3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Nilai 74,48 pada dimensi kesehatan dasar dan kesejahteraan menandakan bahwa Kabupaten Kutai Timur telah memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan anak, meski masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal nutrisi, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

### **Indeks D4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya mencatat nilai terendah kedua yaitu 34,54. Ini merupakan isyarat yang jelas bahwa sektor ini memerlukan perhatian serius dan peningkatan. Perlu ada investasi lebih dalam pendidikan dan pengembangan fasilitas untuk waktu luang dan kegiatan budaya yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan anak.

### **Indeks D5: Perlindungan Khusus**

Dengan nilai 72,61, dimensi Perlindungan Khusus menunjukkan bahwa telah ada upaya yang cukup untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan situasi darurat lainnya.

Secara keseluruhan, nilai IPA yang tercatat untuk Kutai Timur mencerminkan ada beberapa kekuatan dan sejumlah tantangan yang signifikan dalam perlindungan anak. Pendidikan dan hak sipil anak menjadi area yang paling memerlukan perbaikan. Sementara itu, lingkungan keluarga, kesejahteraan, dan perlindungan khusus telah menunjukkan hasil yang lebih positif.

## **D. Indeks Pembangunan Gender/Pemberdayaan Gender/Ketimpangan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan ukuran yang menilai kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Fokus utama dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam hal partisipasi politik, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur, IPG digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk memberikan akses yang setara kepada

perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan politik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam semua aspek kehidupan dan untuk memastikan bahwa pembangunan manusia berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Penggunaan IPG dalam RPJMD menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk mengatasi diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita. Hal ini tidak hanya penting dalam mencapai keadilan sosial, tetapi juga penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi, karena pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender telah terbukti meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2. 19 Indeks Pemberdayaan Gender Kutai Timur 2020-2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,35	53,77	53,78	51,55	53,99

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur 2024

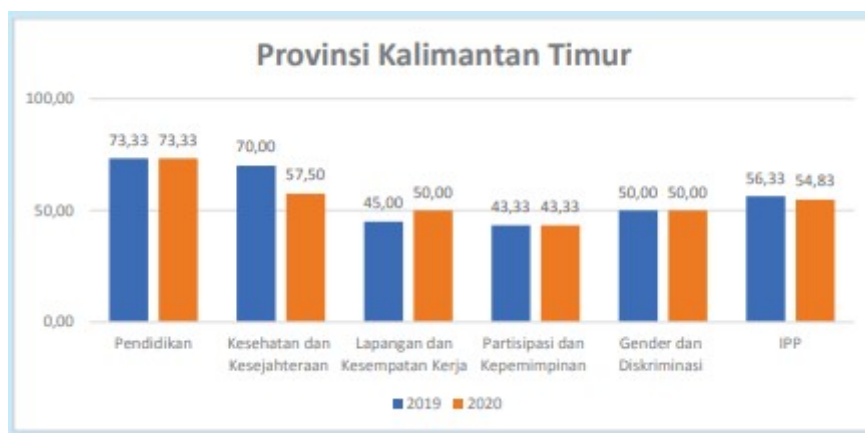
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IDG tercatat sebesar 56,35, menunjukkan tingkat pemberdayaan gender yang relatif baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 53,77. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi partisipasi dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Pada tahun 2021, IDG sedikit meningkat menjadi 53,78, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Tahun 2022 mencatat penurunan lebih lanjut dalam IDG, yang mencapai titik terendah dalam periode ini dengan angka 51,55. Penurunan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pemberdayaan gender di Kutai Timur. Namun, pada tahun 2023, IDG kembali meningkat menjadi 53,99, menunjukkan adanya perbaikan dan upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Peningkatan ini bisa jadi merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang difokuskan untuk mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meski begitu, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan gender masih diperlukan untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan dan signifikan di masa depan.

## E. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan alat ukur yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indeks ini mengukur sejauh mana kaum muda di suatu negara atau wilayah mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan fokus pada pengembangan potensi pemuda, indeks ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan investasi untuk mendukung kaum muda. Peran kaum muda sebagai agen perubahan dan inovasi membuat pengukuran dan peningkatan pembangunan pemuda menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2. 12 Perkembangan IPP Kaltim 2019 - 2020



Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda 2021 (Kementerian PPN/Bappenas)

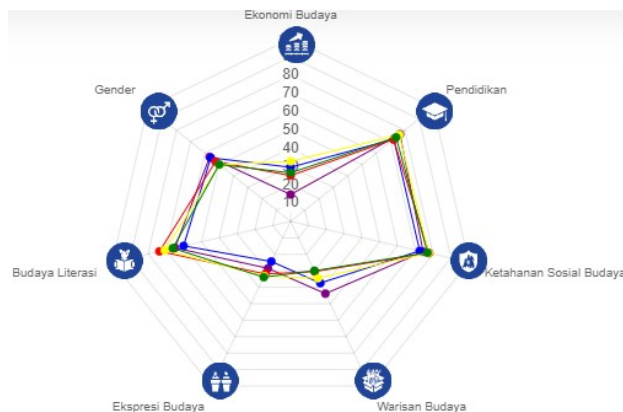
Skor Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2019 dan 2020 meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Skor untuk setiap bidang berada pada skala 0 hingga 100. Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2020, terdapat peningkatan nilai di hampir semua bidang kecuali pada gender dan diskriminasi yang mengalami penurunan, serta lapangan kerja dan kesempatan kerja yang tetap. Pendidikan dan kesehatan mempertahankan skor yang tinggi, menunjukkan prioritas yang kuat dalam pengembangan pemuda di area tersebut.

## F. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan kebudayaan di Indonesia. Indeks ini meliputi aspek-aspek seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. IPK dirancang untuk membantu dalam penyusunan kebijakan bidang kebudayaan dan koordinasi lintas sektor dalam pemajuan kebudayaan.

Meskipun IPK memberikan gambaran umum di tingkat nasional, data ini hanya tersedia hingga level provinsi, tidak spesifik hingga tingkat kabupaten.

Gambar 2. 13 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kaltim



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/64>

Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kaltim 2018-2022

Tahun	IPK	
	Nasional	Kaltim
2018	53,74	52,78
2019	55,91	55,47
2020	54,65	53,25
2021	51,90	52,49
2022	55,13	54,81

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/64>

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi. Pada 2018, IPK Kalimantan Timur berada di bawah skor nasional. Tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan yang mendekati skor nasional. Pada 2020, skor menurun, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pandemi. Peningkatan kembali terjadi pada 2021, meski masih di bawah skor nasional. Tahun 2022 menandai peningkatan yang mencerminkan pemulihan atau kemajuan dalam aspek kebudayaan di Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, terlihat adanya upaya dan dinamika dalam pembangunan kebudayaan di Wilayah Kalimantan Timur

### **2.3. Aspek Daya Saing Daerah**

Kabupaten Kutai Timur adalah sebuah daerah yang kaya akan potensi ekonomi dengan beberapa sektor unggulan yang menjadi tulang punggung pembangunannya. Sektor-sektor ini meliputi pertambangan, agro industri, perkebunan, dan pariwisata, masing-masing memberikan kontribusi signifikan untuk perekonomian lokal dan nasional.

Sektor pertambangan merupakan pilar utama ekonomi di Kutai Timur. Daerah ini kaya akan sumber daya mineral, terutama batu bara, yang telah menarik banyak perusahaan pertambangan besar. Industri pertambangan di Kutai Timur tidak hanya memberikan sumbangan besar terhadap PDB daerah tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja dan menggerakkan industri terkait, seperti transportasi dan logistik.

Agro industri juga menjadi sektor penting di Kutai Timur. Dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung, daerah ini cocok untuk berbagai jenis pertanian dan perkebunan. Produksi kelapa sawit dan karet merupakan kontributor utama, dengan perkebunan-perkebunan besar yang telah lama beroperasi di daerah ini. Pengembangan agro industri tidak hanya berfokus pada produksi tetapi juga pada pengolahan hasil pertanian, sehingga menambah nilai tambah ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Perkebunan merupakan sektor yang tidak terpisahkan dari agro industri. Kutai Timur memiliki lahan perkebunan yang luas dan subur, di mana komoditas utamanya adalah kelapa sawit dan karet. Perkebunan ini tidak hanya penting untuk ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap ekspor nasional. Peningkatan praktek perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi fokus utama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

Pariwisata adalah sektor yang sedang berkembang di Kutai Timur, dengan potensi yang besar untuk menjadi sumber pendapatan penting di masa depan. Wilayah Kabupaten Kutai Timur menawarkan keindahan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Tempat-tempat seperti Taman Nasional Kutai, Goa Karst Magkalihat merupakan daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang alami. Pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bisa membuka peluang ekonomi baru dan mendukung pelestarian alam dan budaya lokal.

Keseluruhan sektor ini, pertambangan, agro industri, perkebunan, dan pariwisata, masing-masing memiliki peran penting dalam perekonomian Kutai Timur. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, sektor-sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan

kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur.

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah merupakan aspek penting yang merefleksikan kemampuan suatu wilayah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memahami dan mengevaluasi daya saing ekonomi suatu daerah, berbagai indikator ekonomi digunakan, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Inklusif, dan Rasio Kewirausahaan.

Dengan memahami dan mengevaluasi indikator-indikator ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang daya saing ekonomi suatu daerah, membantu dalam pembuatan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

#### A. PDRB (Product Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur potensi ekonomi daerah ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran agregat dari total nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Dalam konteks Kutai Timur, PDRB memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sektor-sektor andalan seperti minyak dan gas (migas), serta pertambangan batu bara, berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2.21 PDRB Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dengan Migas (Juta Rp)					
	- Harga Berlaku	133.891.145,4	115.559.861,60	135.378.777,30	211.094.480,00	168.271.523,74
	- Harga Konstan 2010	95.660.745,0	92.846.683,60	91.906.125,30	97.174.420,00	104.663.190,00
2.	Tanpa Migas (Juta Rp)					
	- Harga Berlaku	133.464.938,5	115.200.460,58	134.947.060,74	210.375.994,92	167.735.291,87
	- Harga Konstan 2010	95.340.628,2	92.484.793,71	91.549.032,95	96.797.762,80	104.287.914,03
3.	Tanpa Migas dan Batubara (Juta Rp)					
	- Harga Berlaku	33.093.104,2	37.030.739,52	39.969.417,98	54.098.965,02	51.104.860,57
	- Harga Konstan 2010	21.392.678,1	21.523.577,09	21.528.541,65	22.940.895,47	24.566.933,20

Sumber: LKPJ Bupati Kutai Timur (Data diolah)

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) periode 2019-2023 menunjukkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor migas dan

batubara. Pada tahun 2019, PDRB dengan migas mencapai Rp 133.891.145,4 juta dengan harga berlaku, namun menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 115.559.861,6 juta, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 211.094.480 juta sebelum mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 168.271.523,74 juta. Di sisi lain, PDRB dengan harga konstan 2010 menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 104.663.190 juta, mencerminkan pertumbuhan riil yang lebih moderat.

Jika dilihat tanpa sektor migas, PDRB Kabupaten Kutai Timur juga mengalami tren yang serupa. Pada tahun 2019, PDRB tanpa migas adalah Rp 133.464.938,5 juta dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 115.200.460,58 juta. Pemulihan terjadi pada tahun 2021 hingga mencapai Rp 210.375.994,92 juta pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi Rp 167.735.291,87 juta pada tahun 2023. Dalam harga konstan 2010, PDRB tanpa migas juga menunjukkan pertumbuhan yang serupa dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 104.287.914,03 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor non-migas juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, meskipun tetap dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global.

Ketika menganalisis PDRB tanpa migas dan batubara, terlihat bahwa kontribusi sektor lain menjadi lebih menonjol. Pada tahun 2019, PDRB tanpa kedua sektor tersebut adalah Rp 33.093.104,2 juta dengan harga berlaku, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp 54.098.965,02 juta pada tahun 2022, sebelum sedikit turun menjadi Rp 51.104.860,57 juta pada tahun 2023. Dengan harga konstan 2010, PDRB tanpa migas dan batubara menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp 21.392.678,1 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 24.566.933,2 juta pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan diversifikasi ekonomi Kutai Timur yang semakin kuat, dengan kontribusi sektor-sektor non-pertambangan yang semakin meningkat, yang penting untuk mencapai kestabilan ekonomi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Untuk melihat struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Timur secara utuh, berikut gambaran persentase PDRB Sektoral di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023.

Gambar 2. 14 Persentase PDRB Sektoral Kutim



Sumber: Kutim Dalam Angka 2024

## B. PDRB Per Kapita

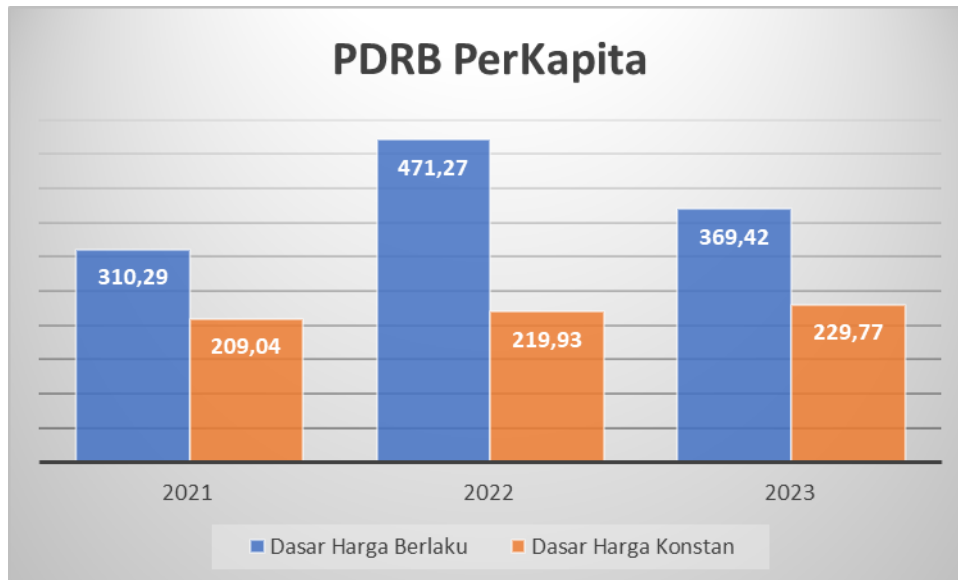
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Kutai Timur merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai dan merencanakan pembangunan jangka panjang. Tingkat PDRB per kapita yang tinggi sering diinterpretasikan sebagai cerminan dari kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Kutai Timur, menandakan bahwa pendapatan rata-rata penduduknya relatif tinggi. Hal ini, pada gilirannya, mencerminkan tidak hanya peningkatan dalam output ekonomi tetapi juga distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata di antara penduduk.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, PDRB per kapita memiliki pengaruh signifikan. Misalnya, tingkat PDRB per kapita yang tinggi dapat menarik perhatian investor, menandakan adanya pasar yang kuat dengan daya beli yang tinggi, yang penting untuk pertumbuhan industri, pariwisata, dan sektor jasa. Di sisi lain, ini juga mengindikasikan bahwa ada ruang untuk pembangunan sumber daya manusia yang lebih lanjut, seperti melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

PDRB per kapita juga penting dalam pembuatan kebijakan di Kabupaten Kutai Timur. Data ini membantu pembuat kebijakan dalam menetapkan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan dukungan lebih, dan menentukan di mana alokasi sumber daya dan investasi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang paling

signifikan. Dengan fokus pada PDRB per kapita, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan.

Gambar 2. 15 PDRB Perkapita Tahun 2021-2023



Sumber: Sumber: Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2024,

Data diolah Keterangan: \*) Angka Sementara

Dalam rentang tiga tahun terakhir, Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan dinamika ekonomi yang fluktuatif, tercermin dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 310,29 juta. Angka ini mencerminkan situasi ekonomi saat itu, yang masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Menyusul pemulihan ekonomi di tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam PDRB per kapita menjadi Rp 471,27 juta. Lonjakan ini menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang kuat, seiring dengan perbaikan kondisi global dan upaya daerah dalam merangsang pertumbuhan.

Namun, di tahun 2023, terjadi penurunan menjadi Rp 369,42 juta. Penurunan ini diakibatkan oleh sejumlah faktor, seperti ketidakstabilan pasar global atau kebijakan ekonomi yang memerlukan waktu untuk menyesuaikan efeknya secara penuh dalam ekonomi lokal.

Dari perspektif harga konstan, yang memberikan pengukuran yang lebih stabil dengan mengeliminasi efek inflasi, terlihat ada pertumbuhan yang konsisten dan positif. Dimulai dari Rp 209,04 juta pada tahun 2021, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 219,93 juta di tahun 2022, dan lebih lanjut naik ke Rp 229,77 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini

mengindikasikan bahwa, di luar fluktuasi harga dan faktor eksternal, Kutai Timur secara fundamental mengalami peningkatan dalam kemampuan ekonominya.

Fluktuasi dalam PDRB per kapita menggambarkan bagaimana ekonomi Kutai Timur secara responsif beradaptasi dengan tantangan dan peluang. Kenaikan yang stabil dalam pendekatan harga konstan menunjukkan bahwa, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian eksternal, terdapat kemajuan ekonomi yang fundamental dan berkelanjutan. Informasi ini menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan dan stakeholder dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi yang akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

### C. Indeks Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif memainkan peran penting dalam pembangunan jangka panjang karena mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, ekonomi inklusif mengurangi ketimpangan, meningkatkan stabilitas sosial, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi berkelanjutan, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang sehat dan stabil. Ekonomi inklusif juga menekankan pada pembangunan kapasitas dan pemberdayaan komunitas lokal, yang merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2. 16 Perkembangan Ekonomi Inklusif Kutai Timur 2011-2021



Sumber: <https://inklusif.bappenas.go.id/data>

Perkembangan pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan tren positif. Kutai Timur, sebagaimana tercermin dalam data, tampaknya telah mengalami peningkatan bertahap dalam aspek-aspek kunci yang mendukung ekonomi inklusif. Ini termasuk peningkatan dalam aksesibilitas, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peningkatan ini menandakan upaya yang berkelanjutan dan efektif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pertumbuhan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan yang inklusif di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada inklusi sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

#### **D. Indeks Ekonomi Hijau (GEI) dan Indeks Ekonomi Biru**

Indeks Ekonomi Hijau memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan karena bisa digunakan untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi diintegrasikan dengan prioritas lingkungan. Indeks ini mengukur kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah berdasarkan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi polutan, dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kemajuan dan area yang memerlukan perbaikan dalam transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan demikian, indeks ekonomi hijau memberikan panduan penting untuk kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga keseimbangan ekologis.

Indeks Ekonomi Hijau (GEI) merupakan alat ukur strategis bagi Kutai Timur dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indeks Ekonomi Hijau membantu mengevaluasi efektivitas transisi ke ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia 2045. Indikator-indikator GEI mengukur kemajuan dalam investasi hijau, manajemen sumber daya yang berkelanjutan, keadilan transisi ekonomi, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Penanaman nilai-nilai ini dalam RPJMD Kutai Timur akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat namun juga merawat kesejahteraan sosial dan keberlangsungan lingkungan, sembari memperkuat ketahanan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Indeks Ekonomi Biru (*Blue Economy Index*) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi maritim dan pesisir yang berkelanjutan. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya laut, kontribusi ekonomi

dari sektor perikanan dan kelautan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta perlindungan ekosistem laut. Karena data Indeks Ekonomi Biru tidak tersedia untuk Kabupaten Kutai Timur, digunakan proksi berupa kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terlihat dari volume produksi perikanan yang tinggi dan kontribusi signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, sektor ini juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berkontribusi pada ekspor hasil perikanan, yang menunjukkan daya saing dan kualitas hasil perikanan.

Perikanan, dalam PDRB digabungkan dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Jasa Pertanian. Kelompok sektor ini menunjukkan penurunan kontribusi dari 9,12% pada tahun 2020 menjadi 5,90% pada tahun 2022, sebelum naik lagi menjadi 7,60% pada tahun 2023. Ini menunjukkan volatilitas dalam sektor ini yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi iklim dan pasar.

Gambar 2. 17 Nilai Produksi Perikanan Kutim 2021-2023



Sumber: Dinas Perikanan Kutai Timur 2024

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur 2024, produksi hasil perikanan mengalami fluktuasi dari tahun 2021 sebesar 7072,42 Ton, turun menjadi 7068,38 Ton dan naik signifikan pada tahun 2023 sebesar 9466,78 Ton. Jika dihitung nilai produksi hasil perikanan dengan mata uang Rupiah, maka pada tahun 2021, sebesar 221,08 Milyar, naik menjadi 248,09 Milyar pada tahun 2022 dan 315,90 Miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan nilai produksi perikanan laut yang signifikan mencerminkan potensi ekonomi yang besar dari sektor ini, kemungkinan didorong oleh peningkatan kualitas produk, pemasaran yang efektif, serta peningkatan permintaan pasar baik lokal maupun internasional.

## **E. Rasio Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM**

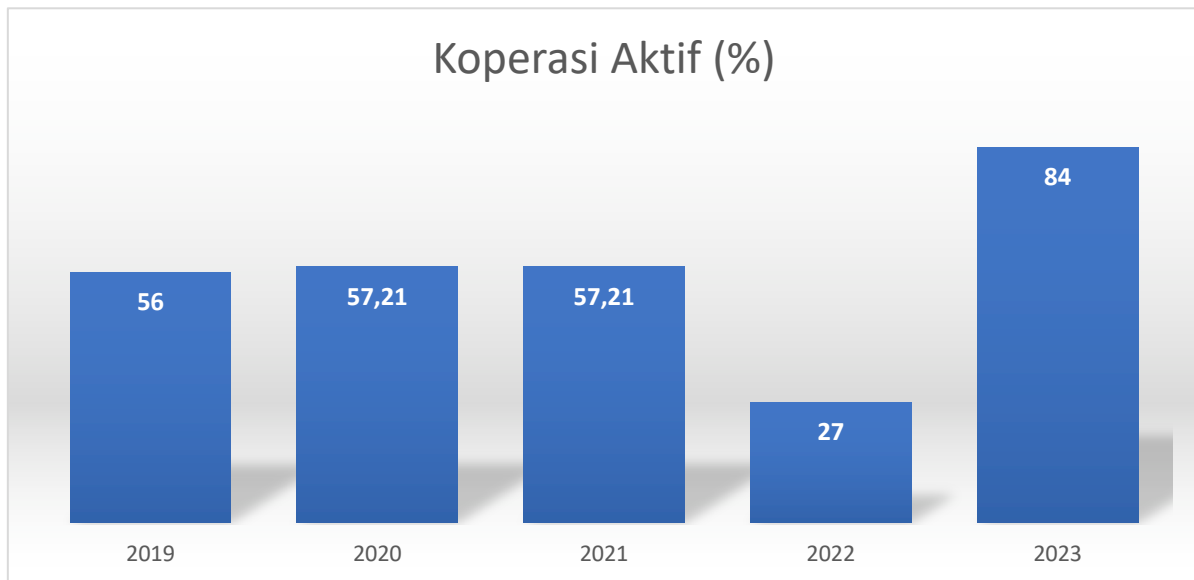
Di tengah upaya nasional Indonesia untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 12 persen guna mencapai status negara maju pada 2045, Kabupaten Kutai Timur memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Kutai Timur berpotensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan yang bersandar pada pemanfaatan sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan inovatif. Saat ini, secara nasional rasio kewirausahaan masih berada pada angka 3,47%, masih sangat jauh dari target nasional.

Data dari KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035 menyebutkan bahwa sebanyak 36,21% penduduk Kabupaten Kutai Timur bekerja sebagai wiraswasta. Potensi ini memberikan harapan yang besar, akan menjadi embrio kegiatan ekonomi baru, yang jika diselaraskan dengan potensi sumber daya yang dimiliki, akan memunculkan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Koperasi memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Sebagai model bisnis yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kerja sama, koperasi dirancang untuk memberdayakan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Peningkatan jumlah koperasi aktif diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan karena koperasi berfungsi sebagai wadah peningkatan pendapatan anggota dan redistribusi kekayaan serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dengan beroperasinya lebih banyak koperasi yang efektif dan efisien, peluang kerja akan meningkat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Koperasi juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggotanya, memberikan akses ke pasar yang lebih luas, dan menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, keberadaan dan pengembangan koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung ekonomi di daerah pedesaan dan komunitas yang kurang mampu.

Gambar 2. 18 Prosentasi Koperasi Aktif Kutim 2019-2023



Sumber: Dinkop UMKM Kutim 2024

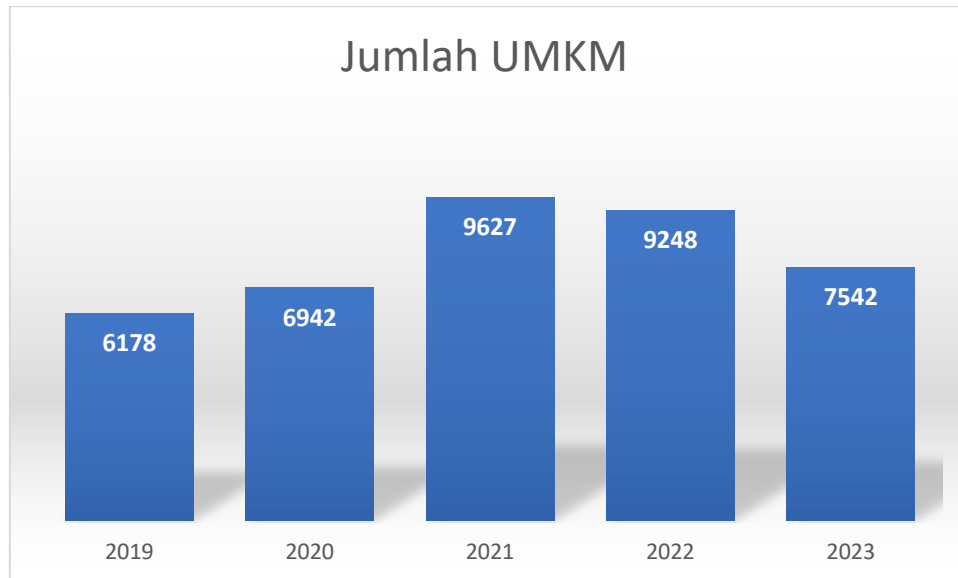
Analisis grafik persentase koperasi aktif dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam aktivitas koperasi di daerah tersebut. Pada tahun 2019, persentase koperasi aktif adalah 56%. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2020 dan tetap stabil hingga 2021 di angka 57,21%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam dalam persentase koperasi aktif, turun menjadi hanya 27%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang mempengaruhi operasional dan keberlanjutan koperasi.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase koperasi aktif, mencapai 84%. Peningkatan drastis ini menunjukkan adanya upaya revitalisasi dan pemulihan koperasi yang berhasil. Upaya tersebut mungkin termasuk bantuan pemerintah, peningkatan kesadaran anggota koperasi, dan program-program yang mendukung keberlanjutan koperasi. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika perubahan dalam aktivitas koperasi, dengan fluktuasi yang mencerminkan tantangan dan keberhasilan dalam pengelolaan dan dukungan terhadap koperasi di daerah tersebut.

UMKM di Kabupaten Kutai Timur memainkan peran vital dalam perekonomian daerah, menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih dari 7.500 UMKM aktif hingga tahun 2023, sektor ini berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan sumber penghasilan bagi banyak keluarga.

Selain itu, mereka juga berperan dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas lokal, memanfaatkan sumber daya daerah, serta memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Dukungan dari pemerintah melalui berbagai program dan pelatihan terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Kutai Timur.

Gambar 2. 19 UMKM Kutim 2019-2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kutim 2024

Analisis jumlah UMKM dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah UMKM tercatat sebanyak 6.178 unit. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6.942 unit, yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi kecil dan menengah di wilayah tersebut. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2021, dengan jumlah UMKM mencapai 9.627 unit. Pertumbuhan ini kemungkinan didorong oleh upaya pemulihan ekonomi dan berbagai inisiatif pemerintah atau lembaga terkait yang mendorong pengembangan UMKM.

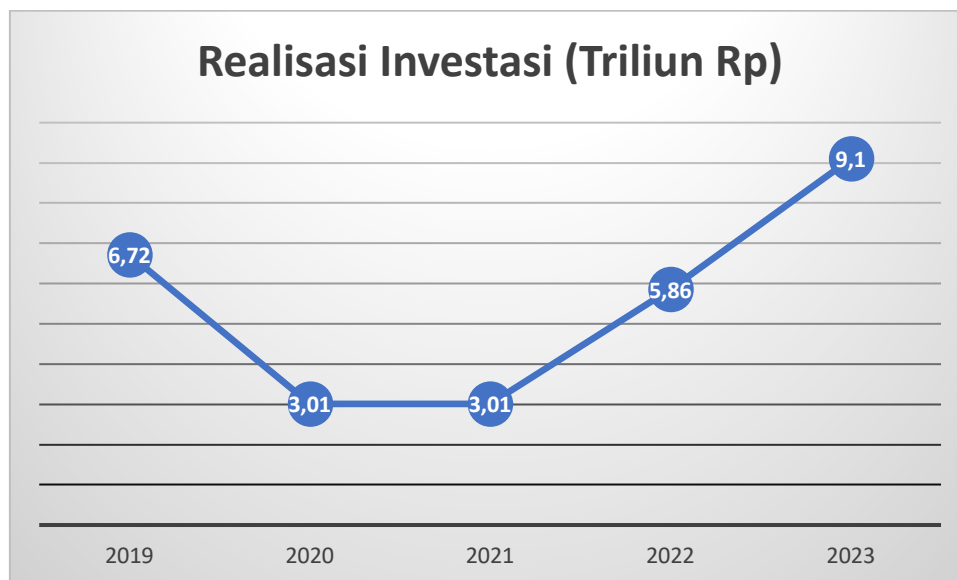
Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM mengalami sedikit penurunan menjadi 9.248 unit. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, seperti perubahan kondisi pasar atau kesulitan dalam mendapatkan akses ke sumber daya. Pada tahun 2023, jumlah UMKM kembali menurun lebih jauh menjadi 7.542 unit. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh sektor UMKM, termasuk kemungkinan penutupan usaha atau berkurangnya kegiatan bisnis akibat faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan yang signifikan di tengah periode tersebut, tren akhir menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap stabilitas dan keberlanjutan UMKM.

## F. Penanaman Modal

Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi investasi serta peningkatan kualitas pelayanan. Intensifikasi melibatkan peningkatan investasi di sektor yang ada, sementara ekstensifikasi menciptakan peluang investasi baru. Upaya ini didukung oleh perencanaan strategis dan melibatkan semua pihak terkait. Bertindak sebagai leader Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait investasi dan perizinan.

Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat beberapa perkembangan signifikan dalam kajian potensi daerah, promosi, investasi, dan kepuasan masyarakat.

Gambar 2. 20 Capaian Penanaman Modal Kutim 2019-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kutim 2024

Analisis realisasi investasi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, realisasi investasi mencapai Rp 6,72 triliun, menandakan kondisi ekonomi yang cukup kuat dan menarik bagi investor. Namun, pada tahun 2020, realisasi investasi mengalami penurunan tajam menjadi Rp 3,01 triliun. Penurunan ini bisa diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan mengurangi aktivitas investasi.

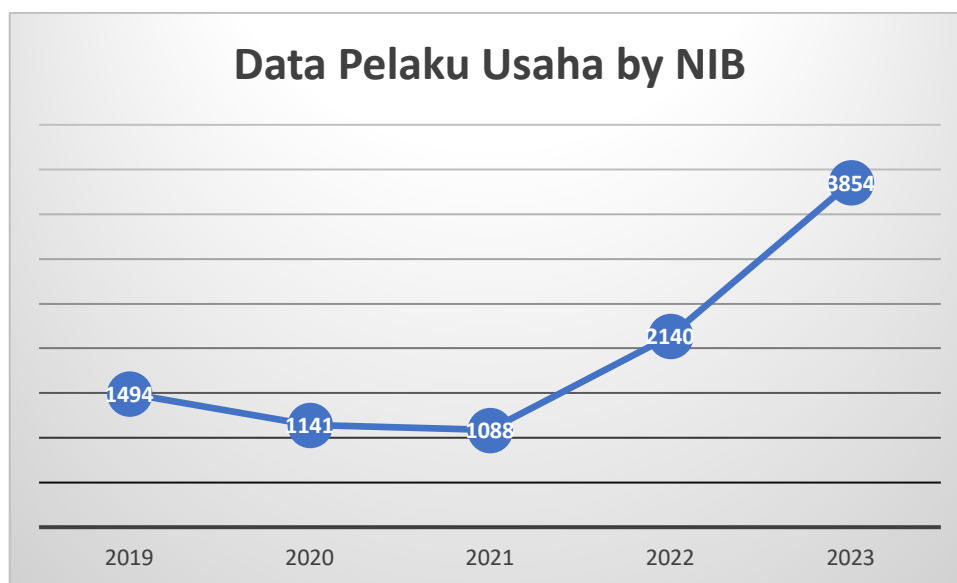
Tahun 2021 menunjukkan stagnasi dengan realisasi investasi tetap di angka Rp 3,01 triliun. Meskipun ekonomi mulai pulih, tantangan untuk memulihkan kepercayaan investor masih berlanjut. Namun, pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang signifikan dalam realisasi

investasi, mencapai Rp 5,86 triliun. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai membuahkan hasil, serta kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih menarik bagi investor.

Pada tahun 2023, realisasi investasi melonjak tajam hingga mencapai Rp 9,1 triliun. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan meningkatnya minat investor terhadap peluang investasi di wilayah tersebut. Lonjakan ini bisa juga disebabkan oleh berbagai proyek strategis dan peningkatan daya tarik ekonomi lokal yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perjalanan pemulihan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Timur yang menunjukkan tren positif setelah mengalami tantangan berat selama pandemi.

Data pelaku usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun dengan tren peningkatan yang signifikan pada akhirnya. Pada tahun 2019, jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB adalah 1.494, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.141 dan terus menurun hingga 1.088 pada tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tantangan ekonomi dan regulasi yang dihadapi oleh pelaku usaha. Namun, mulai tahun 2022, jumlah pelaku usaha yang terdaftar mulai menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 2.140 dan melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi 3.854. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendaftar dan memperoleh NIB, serta membaiknya kondisi ekonomi yang mendorong lebih banyak individu dan perusahaan untuk memulai atau meresmikan usahanya.

Gambar Pelaku Usaha Berdasar NIB



Sumber: Dinas PMPTSP Kutim 2024

Analisis grafik jumlah pelaku usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada akhir periode. Pada tahun 2019, terdapat 1.494 pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB, menandakan awal yang cukup kuat dalam jumlah registrasi bisnis baru. Namun, tahun 2020 mencatat penurunan jumlah pelaku usaha menjadi 1.141, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak usaha menghadapi tantangan operasional dan ekonomi.

Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB sedikit menurun lagi menjadi 1.088. Penurunan ini mencerminkan berlanjutnya ketidakpastian ekonomi dan mungkin kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Namun, memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 2.140 pelaku usaha yang terdaftar. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan berbisnis dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB melonjak drastis menjadi 3.854. Lonjakan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat dan kepercayaan yang meningkat di antara pelaku usaha terhadap iklim bisnis yang semakin membaik. Kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan usaha baru, peningkatan akses terhadap pembiayaan, serta perbaikan dalam proses registrasi usaha mungkin berkontribusi pada pertumbuhan yang signifikan ini. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan aktivitas bisnis yang menjanjikan dan menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

### **2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia**

#### **A. Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan di Kutai Timur menunjukkan tren positif selama periode 2020-2022, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur. Indeks ini merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Menggunakan dua komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indeks ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang status pendidikan di Kutai Timur.

Cara menghitung indeks ini dimulai dengan menilai IHLS, yang merupakan perbandingan antara harapan lama sekolah di suatu daerah dengan standar maksimum pendidikan formal yang umumnya ditetapkan sebesar 18 tahun. Ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan bisa dijalani oleh anak-anak yang sedang dalam usia sekolah.

Selanjutnya, IRLS dihitung dengan membandingkan rata-rata lama sekolah yang telah diterima oleh populasi usia 25 tahun ke atas dengan standar yang sama, yaitu 18 tahun. Ini merefleksikan durasi pendidikan yang secara rata-rata telah diterima oleh warga dewasa. Dengan menggabungkan kedua indeks ini, kita mendapatkan gambaran komprehensif mengenai status pendidikan di suatu wilayah, yang tidak hanya melihat ke depan ke harapan masa depan tetapi juga menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman pendidikan masa lalu.

Indeks Pendidikan secara keseluruhan kemudian dihitung dengan mengambil rata-rata geometris dari IHLS dan IRLS. Ini dilakukan dengan mengalikan kedua nilai indeks dan mengambil akar kuadrat dari hasil perkalian tersebut. Dengan cara ini, Indeks Pendidikan memberikan nilai yang mencerminkan kombinasi dari aspirasi pendidikan masa depan dan realitas pendidikan masa lalu, memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam tentang kualitas dan akses pendidikan dalam suatu populasi.

Tabel 2. 22 Indeks Pendidikan Kutai Timur 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah		12,89	12,90	13,00	
Rata-rata Lama Sekolah		9,19	9,43	9,44	
Indeks Pendidikan		0,605	0,613	0,615	

Sumber: Kutim Dalam Angka 2023 (diolah).

Peningkatan Harapan Lama Sekolah dari 12,89 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,00 tahun pada tahun 2022 menggambarkan upaya yang signifikan dalam memperluas durasi pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak di Kutai Timur. Di sisi lain, Rata-rata Lama Sekolah yang juga meningkat dari 9,19 tahun menjadi 9,44 tahun dalam periode yang sama menggambarkan perbaikan dalam partisipasi pendidikan di kalangan penduduk usia dewasa dan peningkatan ketersediaan akses pendidikan.

Peningkatan bertahap dalam indeks pendidikan, dari 0.605 pada tahun 2020 menjadi 0.615 pada tahun 2022, mencerminkan perbaikan kualitas dan akses pendidikan di Kutai Timur. Tren positif ini bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai program dan kebijakan yang mendukung, serta peningkatan kesadaran dan kepentingan pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan yang lebih baik memiliki korelasi langsung dengan peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendapatan, dan kualitas hidup secara umum. Sejalan dengan ini, peningkatan indeks pendidikan dapat menjadi indikator potensial

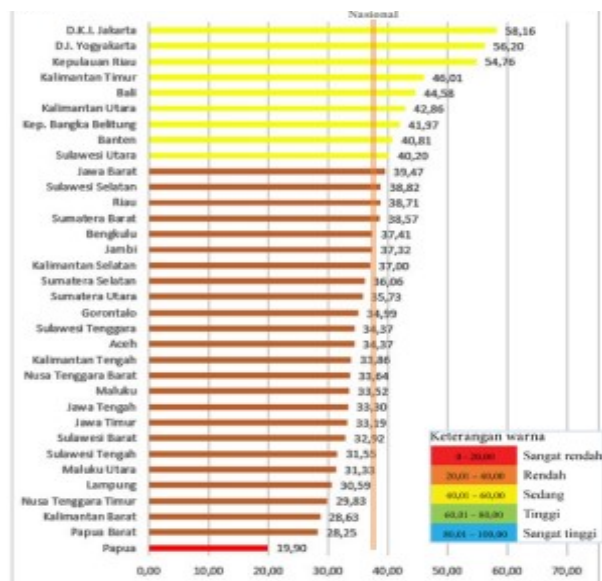
peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesadaran kesehatan.

## B. Angka Literasi/Numerasi

Indeks literasi seringkali dianggap sebagai fondasi yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai ukuran kemampuan membaca dan menulis, serta pemahaman terhadap teks dan konteks, indeks literasi memberikan gambaran tentang sejauh mana penduduk suatu wilayah dapat mengakses, memproses, dan memanfaatkan informasi. Hal ini penting karena literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan kunci utama dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep penting yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Secara nasional, Kalimantan Timur dengan skor 46,01 menempati posisi ke-4 tingkat literasi membaca, dibawah DKI Jakarta, Yogyakarta dan Kepri.

Gambar 2. 21 Indeks Alibaca Nasional



Sumber: Indeks Aktivitas Membaca 34 Provinsi

## C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasar data Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023, IPLM Kabupaten Kutai Timur mencatatkan skor diangka 57,87 dengan faktor penentu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023

No	Unsur (UPLM)	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,6711
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,2421
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,4266
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,1557
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,5555
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	1,0000
<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		<b>57,87</b>

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023

#### D. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan konsep penting dalam era informasi dan teknologi saat ini. Konsep ini mengevaluasi sejauh mana individu dan komunitas memiliki akses, keterampilan, dan kemampuan untuk menggunakan alat digital serta sumber daya informasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan menggunakan perangkat atau software, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap konten digital, kemampuan untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif, serta kesadaran terhadap isu keamanan dan privasi online.

Indeks Literasi Digital berperan vital dalam menentukan seberapa siap suatu masyarakat menghadapi transformasi digital. Ini mengukur kapasitas individu dalam mengakses, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi di dunia maya. Seiring dengan transformasi digital yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga interaksi sosial, literasi digital menjadi fondasi yang menentukan bagaimana individu dan komunitas dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Berdasar data yang dirilis oleh Kominfo melalui Status Literasi Digital Di Indonesia 2022, Kalimantan Timur mencatat skor sebesar 3,62 dan menempati urutan ke-3 nasional, dibawah DIY dan Kalimantan Barat.

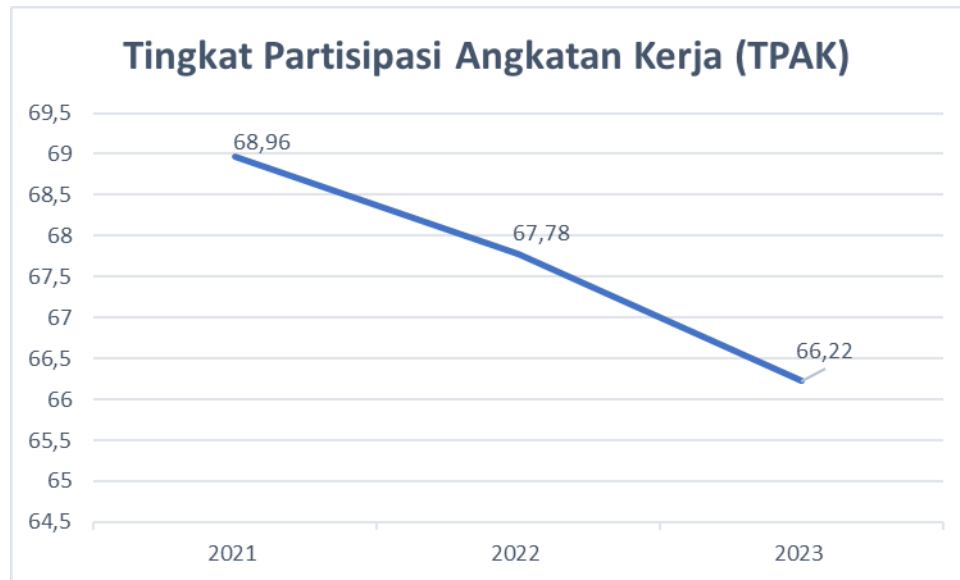
#### E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator kunci dalam menganalisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu wilayah atau negara. Indikator ini

mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerjaan formal, pekerjaan informal, atau mencari pekerjaan baru.

Berdasar data Kutai Timur Dalam Angka 2024, berikut tabel TPAK Kabupaten Kutai Timur, sejak 2021 sampai 2023.

Gambar 2. 22 TPAK Kutai Timur 2021-2023



Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2024 BPS

Dalam periode dari tahun 2021 sampai dengan 2023, Kabupaten Kutai Timur menunjukkan suatu pola penurunan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pada tahun 2021, tingkat partisipasi mencapai 68,96%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, angka ini mengalami penurunan menjadi 67,78% pada tahun 2022, dan terus menurun hingga 66,22% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja setiap tahunnya.

## F. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator demografis yang menunjukkan beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (di atas 65 tahun). Dalam menganalisis data demografis Kabupaten Kutai Timur, dilakukan dengan melihat komposisi angka ketergantungan yang memberikan gambaran menarik tentang struktur sosial dan tantangan ekonomi yang dihadapi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kutai Timur mencapai 109.906 jiwa, sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) tercatat sejumlah 15.925 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang berjumlah 329.673 jiwa, dapat digali lebih dalam mengenai beban ketergantungan yang ada. Dengan jumlah tersebut, maka angka ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebesar 38,15%. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 individu usia produktif, ada sekitar 38 individu yang bergantung padanya

Dari data ini, tampak bahwa Kutai Timur memiliki proporsi yang cukup besar dari penduduk usia muda, yang menandakan potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan namun juga menunjukkan beban pendidikan dan pengasuhan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif saat ini. Di sisi lain, penduduk usia tua yang lebih kecil menunjukkan bahwa beban kesejahteraan dan pensiun lebih ringan saat ini, tetapi dengan peningkatan angka harapan hidup, beban ini bisa meningkat di masa yang akan datang.

Dengan demikian, angka ketergantungan di Kutai Timur mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus merencanakan strategi jangka panjang untuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta menyiapkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung bagi kesejahteraan lanjut usia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penduduk usia muda ini dapat berkembang menjadi angkatan kerja yang produktif dan inovatif, yang pada akhirnya akan menurunkan angka ketergantungan di masa depan.

Pemerintah harus juga menimbang pengembangan program pensiun dan kesehatan yang berkelanjutan untuk menangani peningkatan jumlah penduduk usia tua. Keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan persiapan untuk masa depan akan menjadi kunci untuk menjaga kestabilan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.

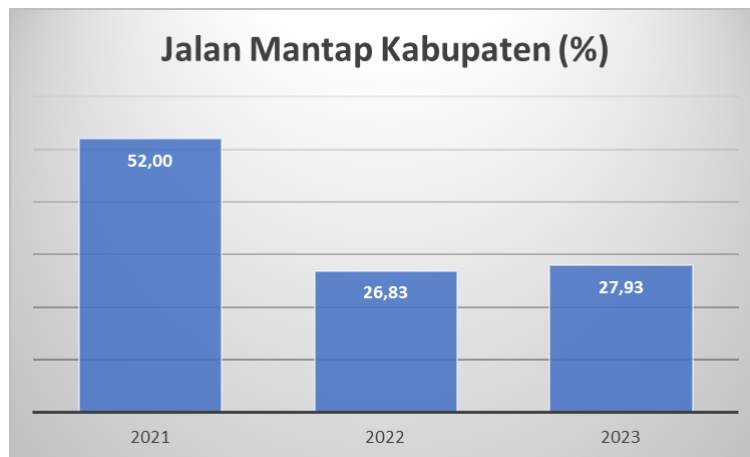
### **2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah**

Daya saing fasilitas dan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur mendapatkan perhatian serius sebagai syarat penting untuk mendorong perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan produktivitas, serta menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.

## A. Kemantapan Jalan

Kemantapan jalan merupakan indikator penting dalam menilai daya saing infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Jalan yang berada dalam kondisi mantap, baik dari segi kualitas permukaan maupun pemeliharaan, mencerminkan kesiapan daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi.

Gambar 2. 23 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap 2021-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

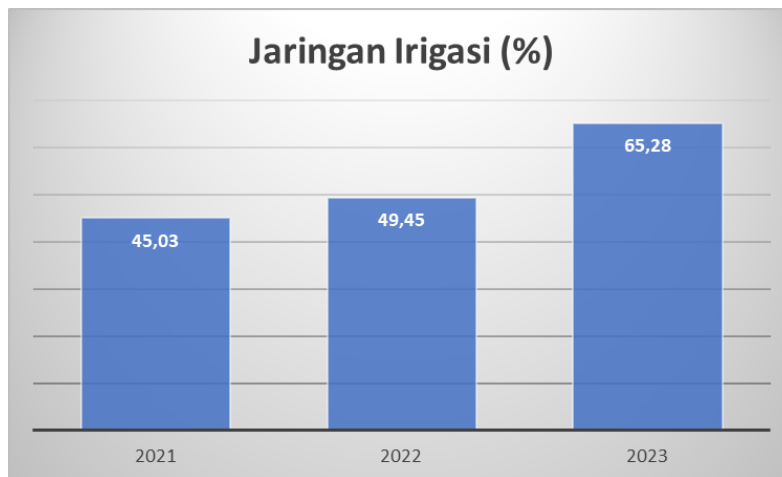
Kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan signifikan, dari 52% pada tahun 2021 menjadi 26,83% pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 27,93% pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam perumusan perhitungan status jalan mantap yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Perubahan ini membuat status jalan mantap lebih sulit dicapai, sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi sulit terpenuhi. Upaya peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan untuk mendukung mobilitas dan ekonomi daerah.

## B. Prosentase Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kutai Timur memainkan peran vital dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Irigasi yang baik memastikan pasokan air yang cukup dan teratur ke lahan pertanian, meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen. Selain itu, keberadaan jaringan irigasi yang memadai membantu petani mengelola air secara efisien, mengurangi risiko kekeringan dan

gagal panen. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kutai Timur.

Gambar 2. 24 Persentase Jaringan Irigasi Kutai Timur 2021-2023



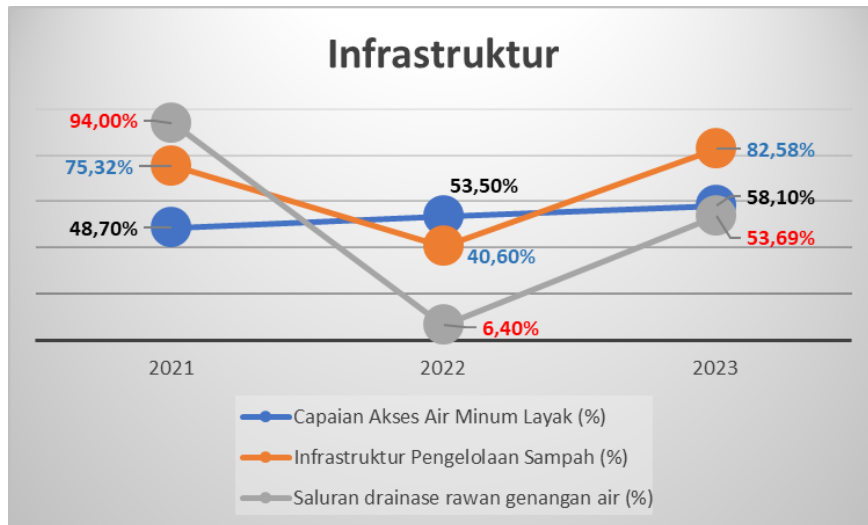
Sumber: Dinas PUPR Kutim 2024

Grafik menunjukkan peningkatan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jaringan irigasi tercatat sebesar 45,03%, meningkat menjadi 49,45% pada tahun 2022, dan mencapai 65,28% pada tahun 2023. Peningkatan signifikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Peningkatan jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian, memastikan pasokan air yang stabil, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan daerah. Peningkatan ini juga berkontribusi pada pengurangan risiko kekeringan dan kegagalan panen, yang sangat penting bagi perekonomian Kutai Timur.

### **C. Infrastruktur Air Minum, Persampahan dan Saluran Drainase Rawan Genangan**

Pembangunan infrastruktur air minum, pengelolaan persampahan, dan sistem saluran drainase di Kutai Timur merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Akses yang memadai terhadap air minum bersih, pengelolaan sampah yang efisien, serta sistem drainase yang baik untuk mengatasi genangan menjadi prioritas pemerintah daerah.

Gambar 2. 25 Infrastruktur Air, Sampah dan Drainase Kutim 2021-2023



Sumber: Dinas PUPR Kutim 2021-2023

Terdapat fluktuasi dan perubahan signifikan dalam berbagai aspek infrastruktur di Kutai Timur antara tahun 2021 hingga 2023. Capaian akses air minum layak meningkat secara konsisten dari 48,70% pada tahun 2021 menjadi 53,50% pada tahun 2022, dan mencapai 58,10% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Namun, terdapat perubahan drastis pada infrastruktur pengelolaan sampah, di mana terjadi penurunan tajam dari 75,32% pada tahun 2021 menjadi 40,60% pada tahun 2022, sebelum melonjak kembali menjadi 82,58% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah yang dihadapi selama periode tersebut.

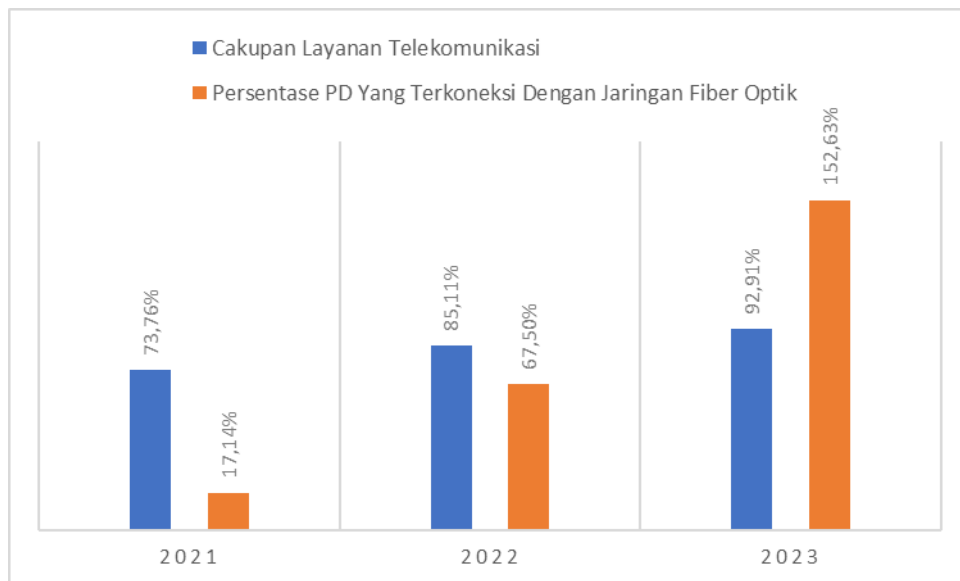
Adapun saluran drainase rawan genangan air menunjukkan penurunan tajam dari 94,00% pada tahun 2021 menjadi 6,40% pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 53,69% pada tahun 2023. Perubahan ini menunjukkan adanya usaha perbaikan dan peningkatan sistem drainase, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mengurangi risiko genangan air secara lebih efektif.

#### D. Jaringan Internet

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen meningkatkan konektivitas komunikasi di seluruh wilayah, meskipun menghadapi tantangan. Masalah utama adalah kesulitan komunikasi antar wilayah. Sebagai respons, pembangunan jaringan *Base Transceiver*

Station (BTS) di desa-desa setiap kecamatan diprioritaskan, sesuai RPJMD 2021-2026. Selain itu, pemerintah memfasilitasi perijinan bagi penyedia layanan telekomunikasi untuk memudahkan ekspansi jaringan. Tujuannya adalah menyediakan layanan telekomunikasi merata di seluruh wilayah, sehingga meningkatkan akses komunikasi, mendukung aktivitas ekonomi, dan sosial baik di perkotaan maupun pedesaan.

Gambar 2. 26 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kutai Timur 2021-2023



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Persendian dan Statistik Kab. Kutai Timur Tahun 2024.

Berdasarkan data cakupan layanan telekomunikasi dan konektivitas jaringan fiber optik di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat peningkatan yang signifikan. Cakupan layanan telekomunikasi naik dari 73,76% pada tahun 2021 menjadi 85,11% pada tahun 2022, dan mencapai 92,91% pada tahun 2023. Ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi guna mendukung kebutuhan masyarakat dan ekonomi yang semakin digital.

Selain itu, persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik juga meningkat tajam. Pada tahun 2021, hanya 17,14% Perangkat Daerah yang terkoneksi, meningkat menjadi 67,50% pada tahun 2022, dan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 152,63% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan investasi signifikan dalam infrastruktur digital, yang meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah serta memperkuat layanan publik berbasis digital. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang lebih

baik, Kutai Timur dapat lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan berbasis teknologi dan informasi, mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing investasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur dapat dipahami melalui beberapa indikator penting, termasuk Indeks Demokrasi, Indeks Kerukunan Umat Beragama, dan Indeks Daya Saing Daerah.

##### A. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi, sebagai salah satu indikator, mencerminkan kondisi politik dan kebebasan yang ada di suatu daerah. Kalimantan Timur, termasuk Kutai Timur, menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2022, dengan menempati peringkat ke-4 secara nasional. Ini menandakan adanya lingkungan demokratis yang kondusif, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Lingkungan politik yang stabil dan demokratis mendorong transparansi dan kepastian hukum, dua faktor kunci yang sering dicari oleh investor.

Tabel 2.24 Indeks Demokrasi Kalimantan Timur

Tahun	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi	81,02	83,58	

Sumber: bps.go.id

Peningkatan nilai Indeks Demokrasi dari 81,02 di tahun 2021 menjadi 83,58 di tahun 2022 merupakan indikasi positif dari perkembangan demokrasi. Kenaikan ini mencerminkan aspek-aspek vital dalam penerapan nilai-nilai demokrasi, termasuk peningkatan partisipasi publik dalam proses politik, kebebasan berekspresi, dan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan.

Kenaikan ini, meskipun tidak terlalu besar, tetap penting karena mengindikasikan adanya perubahan yang signifikan dalam praktik demokrasi. Stabilitas politik yang tercermin dari nilai indeks ini sangat penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Stabilitas ini juga merupakan faktor penting yang menarik bagi investor, baik lokal maupun asing, karena mereka sering mencari kepastian hukum dan politik sebelum melakukan investasi.

Selain itu, peningkatan indeks ini juga menunjukkan peningkatan partisipasi dan pengaruh masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah.

Hal ini merupakan aspek penting dari demokrasi yang sehat, di mana masyarakat memiliki suara yang lebih besar dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

## B. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur menyatakan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kutai Timur yang mengalami peningkatan dari 67,46 pada tahun 2020 menjadi 72,39 pada tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam hal kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kutai Timur. Peningkatan ini mengindikasikan beberapa aspek penting.

Pertama, adanya peningkatan nilai indeks ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan dalam toleransi dan harmoni antar umat beragama di Kutai Timur. Ini bisa berarti bahwa ada upaya yang lebih besar dalam mempromosikan pengertian dan penghormatan antar berbagai agama dan keyakinan, yang merupakan fondasi penting untuk kerukunan sosial.

Kedua, peningkatan ini juga bisa mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam menggalang kerukunan umat beragama.

Ketiga, peningkatan ini juga bisa menunjukkan bahwa masyarakat di Kutai Timur secara umum menjadi lebih terbuka dan menerima perbedaan. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat madani, di mana keragaman agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, peningkatan dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kutai Timur merupakan sinyal positif yang menggambarkan perkembangan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Peningkatan ini memberikan harapan bahwa ke depannya, Kutai Timur akan terus mempertahankan dan meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

## C. Indeks Daya Saing Daerah

Analisis terhadap skor Indeks Daya Saing Sektor Daerah (IDSD) untuk Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan beberapa aspek penting dalam konteks pembangunan dan potensi daerah tersebut. Berdasarkan skor yang diperoleh pada berbagai indikator, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Tabel 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kutai Timur 2023

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	4,11	3,61	0,32	3,13	0,51	5,00	1,98	1,42	2,78

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Kutai Timur memiliki skor total IDSD tahun 2023 sebesar 2,78, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,02. Skor ini mencerminkan bahwa Kutai Timur masih terdapat area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Fokus pada peningkatan kualitas SDM, diversifikasi pasar, dan pengembangan infrastruktur dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Kutai Timur di masa mendatang.

## 2.4. Aspek Pelayanan Umum

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), aspek pelayanan umum memegang peranan kunci dan dapat diukur melalui berbagai indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### A. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional tahun 2022, yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, skor yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kutai Timur 2022

No	OPD	Nilai	Kategori
1	Pemkab Kutim	2,48	C-

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional 2022

Dalam upaya mengukur kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tahun 2022 dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional, dan mendapatkan skor 2,48 yang masuk dalam kategori C-.

Kategori C- menggambarkan kinerja yang masih di bawah rata-rata dalam hal pelayanan publik. Skor ini menandakan bahwa terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan dan pembaharuan dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menunjukkan adanya berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi layanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

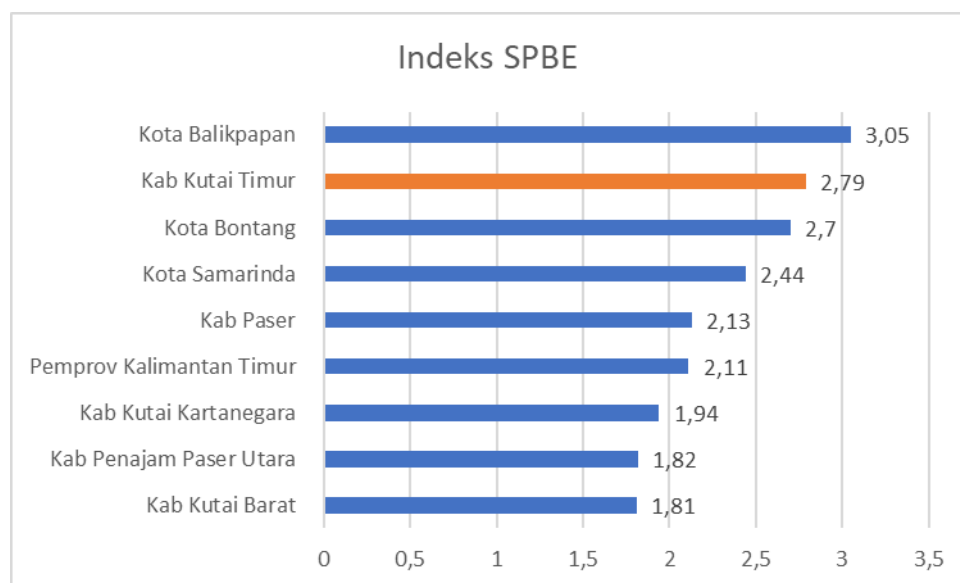
## B. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Kabupaten Kutai Timur yang berada pada angka 12,20 (Kurang Inovatif), menempatkan pada urutan ke-365 dari 415 kabupaten di Indonesia, seperti tercatat dalam Kepmendagri No 400.10.11-6287 Tahun 2023. Penilaian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan inovasi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan inovasi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kinerja administratif dan pelayanan publik tetapi juga untuk mengintegrasikan solusi teknologi yang berkelanjutan dalam sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan mendukung Kutai Timur dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis, serta memperkuat daya saing daerah dalam skala nasional.

## C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kabupaten Kutai Timur berhasil menduduki peringkat kedua di Kalimantan Timur dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 2,79.

Tabel 2.27 Indeks SPBE di Kalimantan Timur



Sumber: KepmenPANRB No 108 tahun 2023

Peringkat ini didasarkan pada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Kutai Timur hanya memiliki skor 1,03. Keberhasilan ini mencerminkan upaya signifikan dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE, termasuk pengelolaan risiko, keamanan informasi, manajemen data, dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini



## **BAB III**

# **Gambaran Keuangan Daerah**

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini mencakup pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga menjadi lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang menjadi milik Daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan satu kesatuan kegiatan yang disebut sebagai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Jika pengelolaan keuangan daerah berhasil melaksanakan proyek-proyek yang telah dimulai, maka pengelolaan keuangan daerah tersebut akan dianggap baik. Mengelola sumber-sumber pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan. Suatu daerah berpeluang untuk berkembang menjadi daerah yang mandiri dan maju apabila dapat memaksimalkan sumber pendapatan asli daerahnya dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer. Kondisi kinerja keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan historis dan prinsip-prinsip pengelolaannya, juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur.

#### **3.1 Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah merupakan salah satu komponen daerah yang tergabung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). APBD yang merupakan penjabaran secara kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah disusun dalam suatu struktur yang menguraikan alokasi dana untuk berbagai sasaran yang ingin dicapai serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, APBD digunakan di daerah sebagai salah satu alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Dalam rangka menghasilkan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun dalam rangka menganalisis pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah membentuk APBD. Oleh karena itu, untuk menganalisis manajemen keuangan daerah, harus terlebih dahulu memahami berbagai tujuan pembiayaan, pengeluaran, dan pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Studi ini diperlukan untuk menentukan kerangka kerja keuangan di masa depan dengan tetap memperhitungkan tantangan dan kemungkinan yang akan dihadapi. Realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk tahun anggaran 2020-2024 disajikan sebagai dasar untuk menghitung pertumbuhan rata-rata, bersama dengan ringkasan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur secara umum. Sementara itu, dengan adanya perubahan yang disebabkan oleh penerapan kebijakan keuangan daerah sebagai dampak dari wabah Covid-19, maka APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai tahun dasar. Perkiraan keuangan dibuat untuk lima tahun berikutnya, dari tahun 2025 hingga 2029.

Adapun komponen-komponen APBD adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dirinci ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun. Kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan-kebijakan sebelumnya akan dibahas selanjutnya. Hal ini akan dibagi menjadi dua kategori: kinerja pendapatan daerah, yang mencakup pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan, dan kinerja belanja daerah, yang mencakup belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

#### 3.1.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Penganggaran pada dasarnya adalah membandingkan anggaran aktual dengan anggaran yang diproyeksikan (yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran). Serupa dengan hal ini, tujuan dari APBN/APBD adalah untuk membandingkan pendapatan dan realisasi anggaran dengan pengeluaran dan realisasi anggaran. Dalam kerangka APBD, pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran pembiayaan ditambah dengan belanja daerah, dan pendapatan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan ditambah dengan pendapatan daerah. Oleh karena itu, kerangka kerja pendapatan daerah dan belanja daerah pada subbab ini akan digunakan untuk analisis keuangan daerah. Kinerja realisasi dan rata-rata peningkatan penerimaan pembiayaan dan pendapatan daerah akan dilihat pada sub-bab pendapatan daerah. Selanjutnya akan diikuti dengan perhitungan prakiraan untuk lima tahun ke depan, yaitu dari tahun 2025 sampai dengan 2029.

#### A. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai semua uang yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lain yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dana yang menjadi hak Daerah dalam periode satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Persentase	+ / (-)
2020	3.558.774.607.930,00	3.309.865.794.397,59	93,01%	(248.908.813.532,41)
2021	2.820.664.498.009,00	3.116.655.808.496,89	110,49	295.991.310.487,89

2022	4.461.066.217.447,00	5.124.474.001.353,81	114,87	663.407.783.906,81
2023	8.256.143.678.724,00	8.571.727.730.961,50	103,82	315.584.052.237,50
2024	8,158,552,071,111.05			

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2020</b>			
a.	PAD	168.017.631.105,00	214.011.744.385,59	127,4
b.	Pendapatan Transfer	3.139.663.465.735,00	3.029.893.185.012,00	96,5
c.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	251.093.511.090,00	247.677.764.854,00	98,64
	<b>Jumlah</b>	<b>3.558.774.607.930,00</b>	<b>3.309.865.794.397,59</b>	<b>93,01</b>
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2021</b>			
a.	PAD	158.318.483.750,00	253.159.605.188,67	159,91
b.	Pendapatan Transfer	2.585.749.259.984,00	2.776.170.339.367,00	107,36
c.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	76.596.754.275,00	87.325.863.940,52	114,01
	<b>Jumlah</b>	<b>2.820.664.498.009,00</b>	<b>3.116.655.808.496,89</b>	<b>110,49</b>
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2022</b>			
a.	PAD	243.674.629.624,00	272.421.419.372,81	111,80
b.	Pendapatan Transfer	4.123.446.896.272,00	6.453.948.227.486,00	156,52
c.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	93.944.691.551,00	77.553.804.349,00	82,57
	<b>Jumlah</b>	<b>4.461.066.217.447,00</b>	<b>5.124.474.001.353,81</b>	<b>114,87</b>
<b>4.</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2023</b>			
a.	PAD	787.536.712.652,00	901.067.608.356,50	114,42

	b. Pendapatan Transfer	7.444.042.116.121,00	7.650.025.806.205,00	102,77
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	24.564.849.951,00	20.634.316.400,00	84
	<b>Jumlah</b>	<b>8.256.143.678.724,00</b>	<b>8.571.727.730.961,50</b>	<b>103,82</b>
<b>5.</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2024</b>			
	a. PAD	245,256,666,302,00		
	b. Pendapatan Transfer	7,893,815,310,007,00		
	c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	19,480,094,802,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>8,158,552,071,111.05</b>		

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur

Data di atas menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah terlihat cukup konstan antara tahun 2020 dan 2023. Dengan demikian, secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun terakhir cukup konstan dan telah memenuhi target. Kinerja pendapatan daerah terbaik Kabupaten Kutai Timur dicapai pada tahun 2022, dimana realisasi pendapatan daerah mencapai 114,87% dari target. Pencapaian Transfer sebesar 156,52% yang berada di atas target menjadi pendukung pencapaian tersebut. Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mencapai 111,80%, namun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai target 82,57%.

Pada tahun 2021, Kabupaten Kutai Timur memiliki capaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua, dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 110,49% dari target. Pencapaian ini ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 159,91%, di mana realisasi tersebut berada di atas target. Pada saat yang sama, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 114,01%, sedangkan kinerja realisasi Pendapatan Transfer adalah sebesar 107,36%.

Dengan hanya mencapai 93,01% dari target yang ditetapkan, tahun 2020 merupakan tahun dengan kinerja pendapatan daerah terendah hingga saat ini. Hal ini dapat dimaklumi pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga banyak target pendapatan yang tidak mencapai harapan. Berdasarkan ringkasan 4 tahun tersebut, menunjukkan bahwa kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten

melampaui target bahkan di era pandemi covid-19 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang cukup signifikan di daerah.

Kinerja PAD memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,53%, pos Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar. Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 - 2023

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
	<b>Pendapatan</b>					
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	214.011.744.385,59	253.159.605.188,67	272.421.419.372,81	901.067.608.356,50	85%
	Pajak Daerah	114.059.911.335,90	99.793.473.728,41	98.631.755.308,44	119.665.567.598,11	2,55%
	Retribusi Daerah	6.876.867.424,00	6.314.204.198,00	6.356.405.010,00	4.638.173.595,00	-11,52%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.154.852.866,57	4.258.759.576,74	5.085.760.437,65	5.332.834.233,15	8,93%
	Lain - Lain PAD yang Sah	8.920.052.158,12	142.793.167.685,52	162.356.912.321,72	771.431.032.930,24	629,89%
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	3.029.893.185.012,00	2.776.170.339.367,70	4.774.489.363.927,00	7.650.025.806.205,00	41,28%
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	2.503.977.023.693,00	2.156.900.953.175,00	3.966.815.708.205,00	6.340.773.855.865,00	43,3%
	Dana Bagi Hasil Pajak	193.251.430.668,00	394.157.444.636,00	295.004.048.724,00	515.177.013.084,00	51,15%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.503.868.305.681,00	1.014.904.225.143,00	2.740.060.270.361,00	4.811.311.207.791,00	71,02%

	Dana Alokasi Umum	570.247.951.000,00	558.995.500.000,00	558.227.503.000,00	579.661.097.958,00	0,58%
	Dana Alokasi Khusus	2.360.609.326.344,00	188.843.783.396,00	231.102.258.053,00	208.477.691.848,00	-26,47%
	Dana Desa	-	-	142.421.628.067,00	226.146.845.184,00	58,79%
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	33.027.245.000,00	-	-	-	-
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	33.027.245.000,00				-
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya</b>	379.220.916.319,00	538.772.587.000,00	807.673.655.722,00	1.309.251.950.340,00	50,6%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	379.220.916.319,00	538.772.587.000,00	768.623.655.722,00	1.276.381.950.340,00	54,6%
	Bantuan Keuangan	127.570.000.000,00	80.496.799.192,70	39.050.000.000,00	32.870.000.000,00	-34,74%
	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	127.570.000.000,00	80.496.799.192,70	-	-	58,48%
<b>3.</b>	<b>Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah</b>	251.093.511.090,00	87.325.863.940,52	77.553.804.349,00	20.634.316.400,00	-49,94%
	Pendapatan Hibah	59.150.198.090,00	67.837.807.820,00	5.400.000.000,00	13.806.588.000,00	26,11%
	Pendapatan Lainnya	181.043.313.000,00	19.488.056.120,52	72.153.804.349,00	6.827.728.400,00	-66,47%

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur

Data yang mencakup tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Namun, secara keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir pada semua komponennya.

## B. Penerimaan Pembiayaan

Seperti yang dijelaskan diatas, pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari penerimaan pembiayaan dan realisasi pendapatan daerah. Hanya pada pos Penggunaan SiLPA dan Penerimaan Pinjaman yang memiliki realisasi penerimaan pembiayaan selama lima tahun sebelumnya. Tabel 3.4 di bawah ini menunjukkan perkembangan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
	<b>Pembiayaan</b>					
<b>1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	164.230.318.401,31	271.834.893.004,75	540.865.228.850,43	1.579.067.964.940,76	118,81%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun Sebelumnya	164.230.318.401,31	272.605.644.806,65	539.665.228.850,00	1.579.067.964.940,76	118.85%
	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	-
	Penerimaan Kembali Piutang	0	0	1.200.000.000,00	0	-
	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	46.500.000.000,00	233.08%
	Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	46.500.000.000,00	233.08%

2.	<b>Pembiayaan Netto</b>	159.230.318.401,31	266.834.893.004,75	501.865.228.850,43	1.532.567.964.940,76	120,34%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	272.605.635.759,65	539.994.028.136,43	0	0	-

Sumber: Diolah dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur

### 3.1.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Jumlah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dikenal dengan istilah belanja daerah plus pembiayaan. Namun, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan digabungkan menjadi keuangan daerah dalam sistematika APBD. Secara umum, sistematika APBD terdiri dari pendapatan dikurangi belanja, yang menghasilkan surplus dan defisit. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kemudian dihasilkan dari penggunaan surplus dan defisit tersebut atau dari pemberian pembiayaan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya, akan menggantikan SILPA. Pada sub-bab berikutnya akan disajikan analisis belanja daerah dan keuangan Kabupaten Kutai Timur selama tiga tahun terakhir dan perhitungan prakiraan untuk lima tahun ke depan.

#### A. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Penjelasan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer adalah empat kategori pembagian belanja daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Klasifikasi ini akan memastikan bahwa penganggaran di masa depan akan serupa dan meningkatkan kualitas informasi yang diberikan dengan memberikan peringkat yang sama dengan pelaporannya.

Selama tiga tahun terakhir, realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Realisasi belanja daerah Pemerintah Kutai Timur adalah sebesar Rp7.912.409.152.257,09 pada tahun 2017; jumlah ini meningkat menjadi

Rp8.176.929.496.298,63 pada tahun 2018, dan menjadi Rp9.162.655.939.831,57 pada tahun fiskal 2019, yang menunjukkan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 8,68%.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, sedangkan belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam jangka pendek. Realisasi belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar, yaitu 16,86%, sedangkan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,20%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menaruh perhatian yang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan melakukan investasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serius dalam meningkatkan infrastruktur daerah agar dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat dan daerah sebagai tujuan industri dan investasi, yang terlihat dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk belanja modal. Sementara itu, belanja tidak terduga dan transfer baru diakui dalam dua tahun terakhir dan memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif. Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.5 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
	<b>Belanja Daerah</b>			
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	92,73	84,30	143,12
	Belanja Pegawai	96,13	87,28	110,16
	Belanja Barang dan Jasa	90,77	82,06	170,70
	Belanja Hibah	100,00	88,39	130,91
	Belanja Subsidi	80,17	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	68,76	47,77	404
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	89,46	77,93	200
	Belanja Modal Tanah	93,27	73,55	227,42
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82,40	92,08	148,51
	Belanja Model Gedung dan Bangunan	90,21	87,94	190,54
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90,57	68,78	188,42

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	88,73	96,97	275,85
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	1.468,35
<b>3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	98,27	3,30	-
	Belanja Tidak Terduga	98,27	3,30	-
<b>4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	95,89	97,90	91,47
	Belanja Bantuan Keuangan	95,89	97,90	91,47
	<b>Total Belanja Daerah</b>	92,14	81,84	-4.744,14

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merealisasikan belanja daerah ditunjukkan pada Tabel 3.5 di atas, di mana tingkat penyerapannya di atas 80% pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 realisasi anggaran meningkat hingga -4.744% dibandingkan proyeksi pada tahun tersebut. Hal ini juga membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan anggaran. Tingkat penyerapan belanja tertinggi terdapat pada belanja pegawai dan belanja hibah yang keduanya melebihi 85%. Sedangkan untuk belanja modal mengalami fluktuasi, namun tetap memiliki kinerja realisasi yang semakin baik, di tahun 2021 tingkat penyerapannya mencapai 89%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah meningkatkan kinerja realisasi belanja modalnya, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur daerah, seperti jalan dan jembatan.

Data yang tersaji pada tabel di atas menggambarkan kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang lebih diarahkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk proyek-proyek modal serta produk dan jasa dibandingkan dengan kategori belanja lainnya. Dibandingkan dengan bentuk belanja lainnya, belanja modal lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah karena persentase keseluruhan dari kedua jenis belanja tersebut adalah yang terbesar. Hal ini terlihat dari persentase rincian kedua belanja tersebut selama tiga tahun terakhir: belanja modal berada di kisaran 26%, sementara belanja barang dan jasa berada di kisaran 35%. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk memprediksi belanja daerah di masa depan, pertama-tama perlu dihitung terlebih dahulu kenaikan realisasi belanja daerah selama tiga tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun  
2021-203

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
	<b>Belanja Daerah</b>				
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	1.924.693.918.290,71	2.613.363.634.676,37	5.002.065.854.957	63,59%
	Belanja Pegawai	840.929.684.855,00	1.125.340.741.513,00	1.573.811.507.234	36,66%
	Belanja Barang dan Jasa	1.018.586.718.029,71	1.356.704.493.060,37	3.086.711.160.232	74,2%
	Belanja Hibah	53.942.593.606,00	122.343.527.603,00	336.503.187.491	150,93%
	Belanja Subsidi	10.999.921.800,00			
	Belanja Bantuan Sosial	235.000.000,00	8.974.872.500,00	5.040.000.000	1837,62%
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	706.899.903.372,50	1.005.918.036.438,11	3.941.701.155.350	167,08%
	Belanja Modal Tanah	28.459.700.879,00	32.348.818.348,00	109.586.527.455	126,22%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.013.667.551,50	250.420.915.638,50	681.406.090.773	176,7%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.984.732.268,00	220.324.643.667,00	819.433.817.743	154,82%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	423.227.966.038,00	486.797.230.267,61	2.281.108.441.495	99,26%

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.213.836.636,00	16.026.428.517,00	49.926.223.494	184,72%
	Belanja Modal Aset Lainnya			240.054.390	
<b>3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	23.562.786.490,00	4.003.489.510,00	20.000.000.000	158,28%
	Belanja Tidak Terduga	23.562.786.490,00	4.003.489.510,00	20.000.000.000	158,28%
<b>4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	188.668.864.498,00	423.987.604.639,00	824.943.133.358	109.65%
	Belanja Bantuan Keuangan	188.668.864.498,00	423.987.604.639,00	824.943.133.358	109.65%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat pertumbuhan tahunan yang konsisten sebesar 63% dalam realisasi belanja operasional antara tahun 2021 dan 2023. Demikian pula, kenaikan rata-rata tahunan dalam belanja modal lebih tinggi setiap tahunnya, yaitu sebesar 167%. Dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 74,2% dan 150,93%, belanja barang dan jasa serta belanja hibah merupakan dua kategori belanja yang mengalami pertumbuhan paling tinggi. Selain itu, dari sisi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan tumbuh paling tinggi, yaitu 154,82%, berada di bawah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tumbuh rata-rata 176,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk menekankan pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, yang terlihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan kedua belanja tersebut.

## **B. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan untuk mengetahui besarnya pengeluaran wajib pemerintah yang harus ditutup dari surplus anggaran berjalan. Pengeluaran pembiayaan termasuk dalam belanja daerah bersama dengan komponen lainnya. Statistik realisasi


pengeluaran pembiayaan dan pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ditampilkan pada tabel berikut.


Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2023


Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata pertumbuhan
<b>Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan</b>					
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	39.000.000.000,00	46.500.000.000,00	233.08%
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
- Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	0

Kebijakan alokasi anggaran untuk mendanai pengeluaran, khususnya untuk kebijakan penyertaan modal yang biasanya selalu ada di hampir semua pemerintah daerah di Indonesia telah dilakukan selama tiga tahun terakhir oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas. Penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta dapat memberikan dividen atau keuntungan lain yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah.




 Gedung.M Lt.2, Kampus UI Depok.  
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan Kota Depok  
Jawa Barat 16424


 [lppia.fia@ui.ac.id](mailto:lppia.fia@ui.ac.id)


 <https://fia.ui.ac.id/en/lppia-fia-ui/>



**PT. REFORMASI BIROKRASI  
INDONESIA**

 Menara 165, 4th Floor,  
Jl. TB. Simatupang, Kav. 1, Cilandak  
DKI Jakarta 12560

 [RBIMembangunBangsa@gmail.com](mailto:RBIMembangunBangsa@gmail.com)

 <http://www.ptrbi.com>